



TEMUAN SURVEI NASIONAL KONDISI EKONOMI DAN PETA POLITIK MENJELANG 2024

Waktu survei:
13-21 Agustus 2022

Pengantar

- Isu-isu ekonomi tetap menjadi perhatian publik secara luas. Seiring makin terkendalinya masalah pandemi, langkah-langkah dan proses pemulihan ekonomi menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat. Ekonomi dunia yang belum pulih, ditambah dengan masalah perang di Eropa, membuat pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah ekonomi yang tidak mudah, bahkan ancaman krisis ekonomi juga tampak nyata.
- Baik masyarakat maupun pemerintah dihadapkan pada sejumlah pilihan yang cukup sulit. Sejumlah masalah ekonomi cukup menonjol dan terasa langsung di masyarakat seperti penurunan daya beli, kenaikan harga BBM, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, dan sebagainya.
- Di sisi lain pemerintah dihadapkan pada pilihan mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsidi BBM, tapi juga harus menjaga daya beli masyarakat yang akan mengalami guncangan kalau subsidi BBM dikurangi atau dicabut. Saat yang sama pemerintah harus mencari cara meningkatkan penerimaan negara, seperti misalnya dengan optimalisasi penerimaan pajak dan bukan pajak.

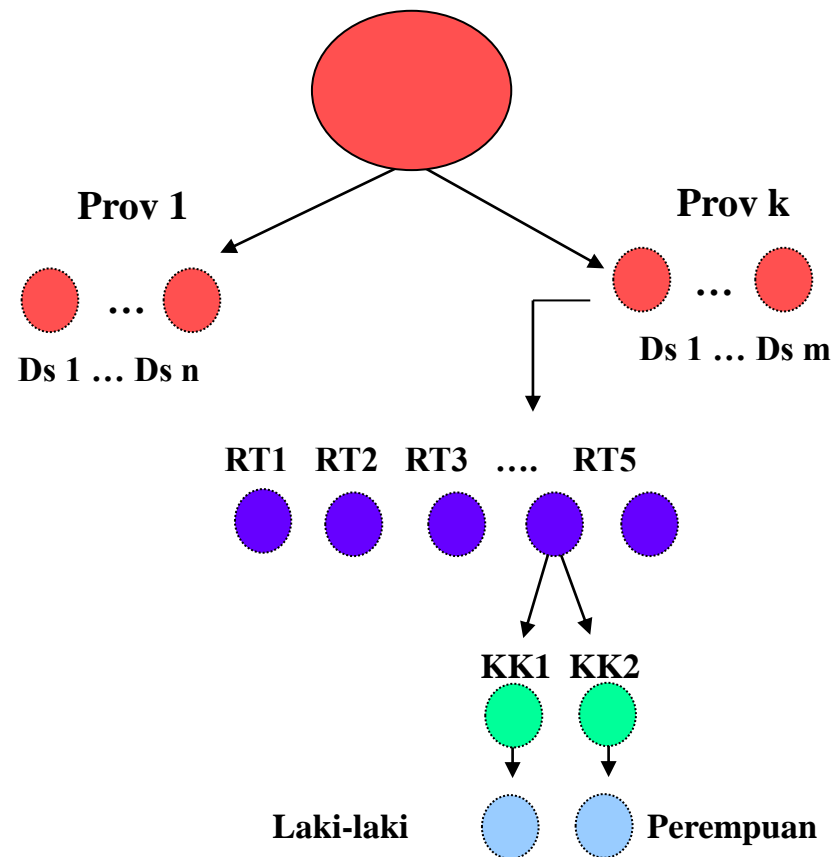
Pengantar

- Masalah politik juga menjadi prioritas. Tahapan pemilu sudah dimulai, baik penyelenggara maupun calon peserta pemilu sudah mulai melakukan berbagai langkah politik untuk sedini mungkin mengkonsolidasikan dukungan politik masyarakat, untuk pilpres maupun pileg.
- Persepsi dan respon masyarakat terhadap berbagai masalah ekonomi dan politik penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Persepsi dan dukungan politik masyarakat menjelang pemilu juga penting agar ada peta jalan yang dapat ditempuh lebih baik bagi para aktor yang terlibat.
- Bagaimanakah kondisi terkini masalah-masalah ekonomi dalam pandangan masyarakat? Bagaimana pula peta dan dukungan politik terkini dalam persepsi warga? Untuk menjawab hal-hal tersebut, LSI mengadakan survei nasional yang dilaksanakan pada 13-21 Agustus, 2022.

METODOLOGI

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE



Populasi desa/kelurahan
tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat
Provinsi dipilih secara random dengan jumlah
proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT
dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan
dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random
Satu orang yang punya hak pilih
laki-laki/perempuan

VALIDASI SAMPLE

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	49.6	50.0
Perempuan	50.4	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	50.0	50.2
Perkotaan	50.0	49.8
USIA		
<= 20 tahun	10.1	10.3
21-25 tahun	11.9	12.5
26-30 tahun	13.0	13.5
31-35 tahun	11.7	12.0
36-40 tahun	11.7	11.6
41-45 tahun	9.9	9.8
46-50 tahun	8.8	8.6
51-55 tahun	6.8	6.6
56-60 tahun	5.3	5.1
> 60 tahun	10.7	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
AGAMA		
Islam	87.9	87.2
Protestan/Katolik	10.0	9.9
Lainnya	2.1	3.0
ETNIS		
Jawa	41.0	40.2
Sunda	15.7	15.5
Batak	3.6	3.6
Madura	3.1	3.0
Betawi	2.9	2.9
Minang	3.1	2.7
Bugis	2.6	2.7
Melayu	2.3	2.3
Lainnya	25.6	27.1

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

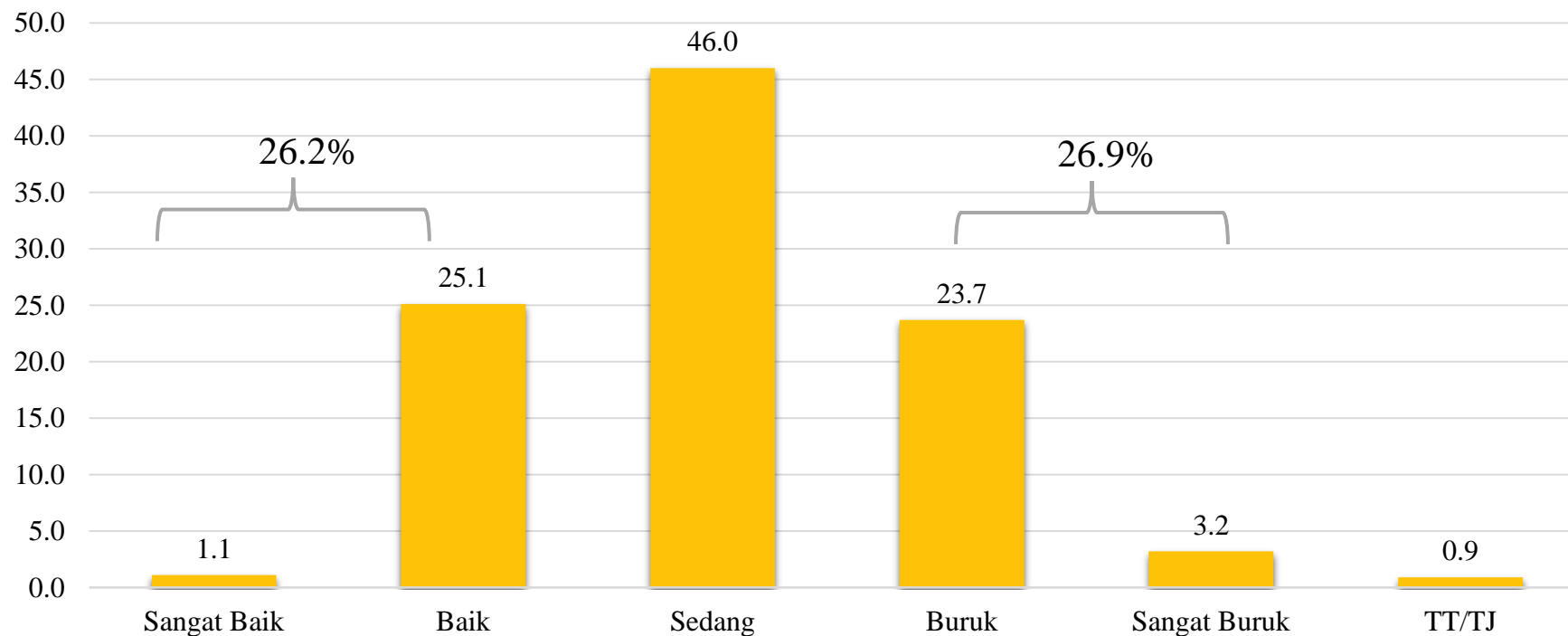
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
KEP. BANGKA BELITUNG	0.5	0.5
KEP. RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
D.I. YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NTB	1.9	1.9
NTT	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	0.4	0.4
PAPUA	1.9	1.9
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2

KONDISI UMUM

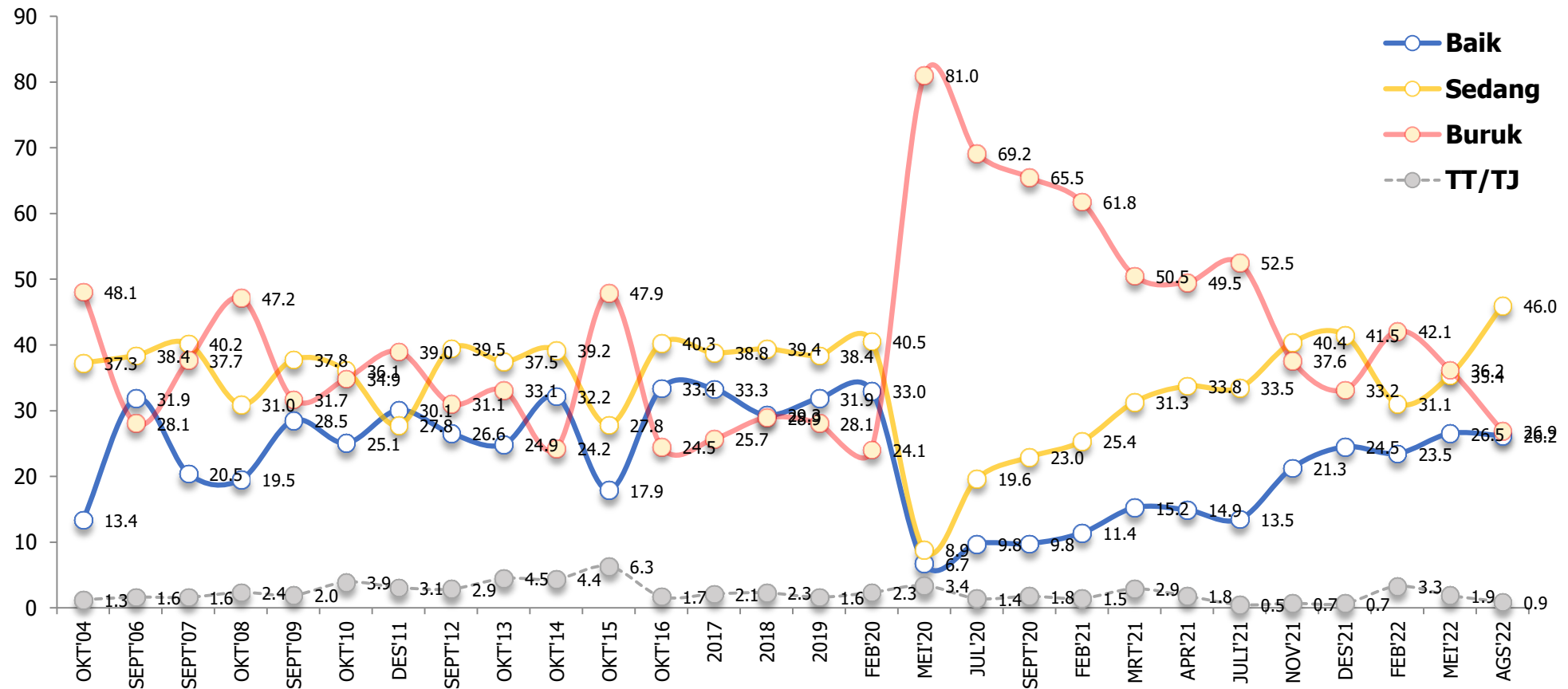
KONDISI EKONOMI

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? (%)



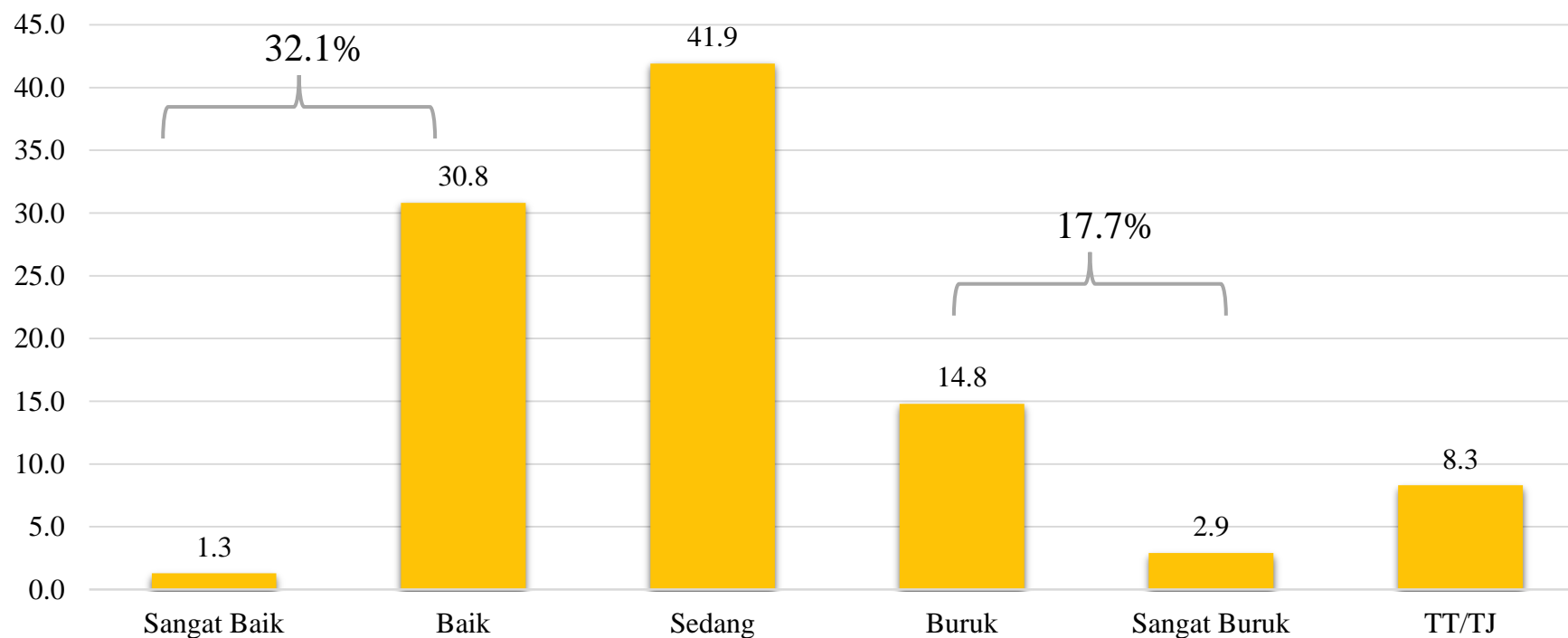
Kondisi ekonomi nasional kebanyakan dinilai sedang.

TREN KONDISI EKONOMI NASIONAL



KONDISI POLITIK

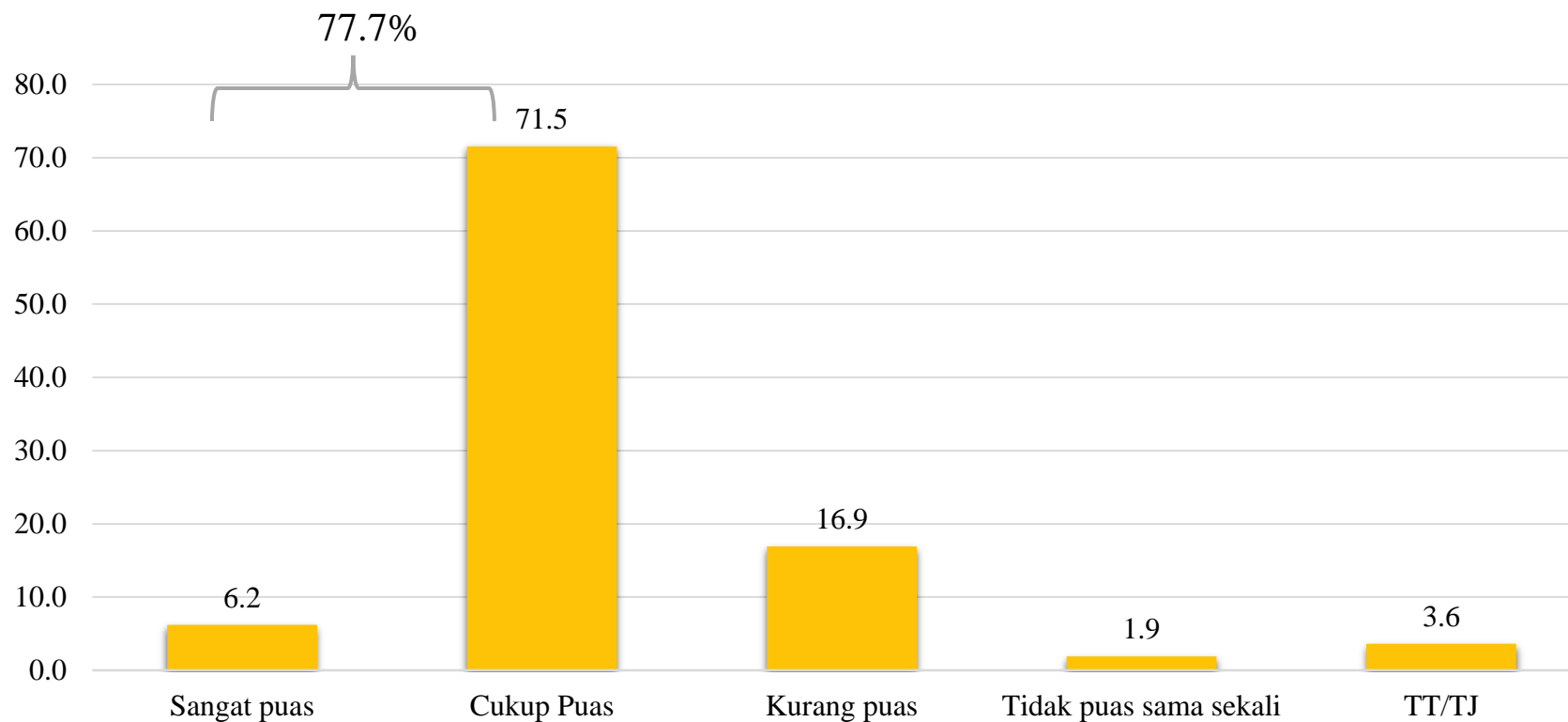
Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? (%)



Kondisi politik nasional kebanyakan dinilai sedang, sementara yang menilai baik/sangat baik lebih banyak dibanding yang menilai buruk/sangat buruk.

KINERJA DEMOKRASI

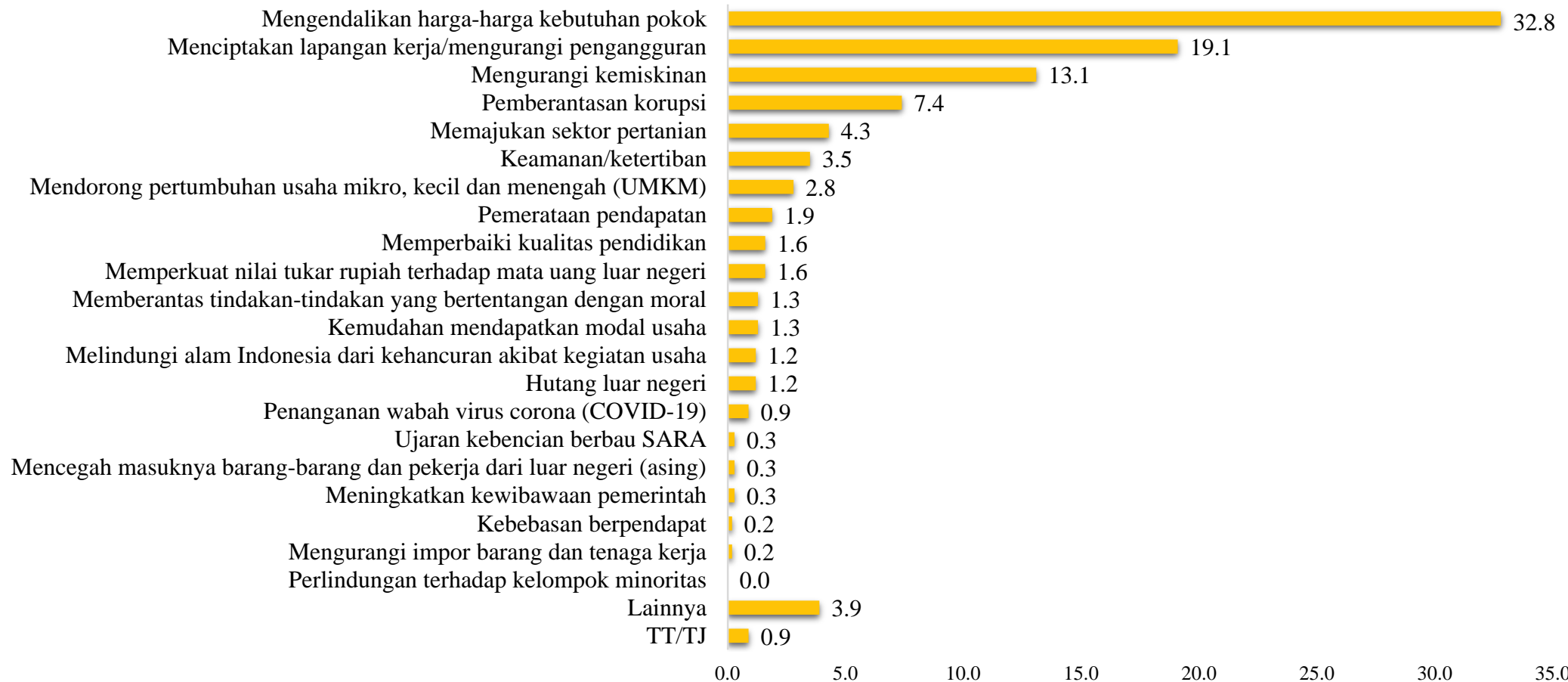
Seberapa puas atau tidak puaskah Ibu/Bapak terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita sejauh ini? (%)



Mayoritas warga cukup/sangat puas dengan jalannya demokrasi di negeri kita sekarang ini.

MASALAH MENDESAK

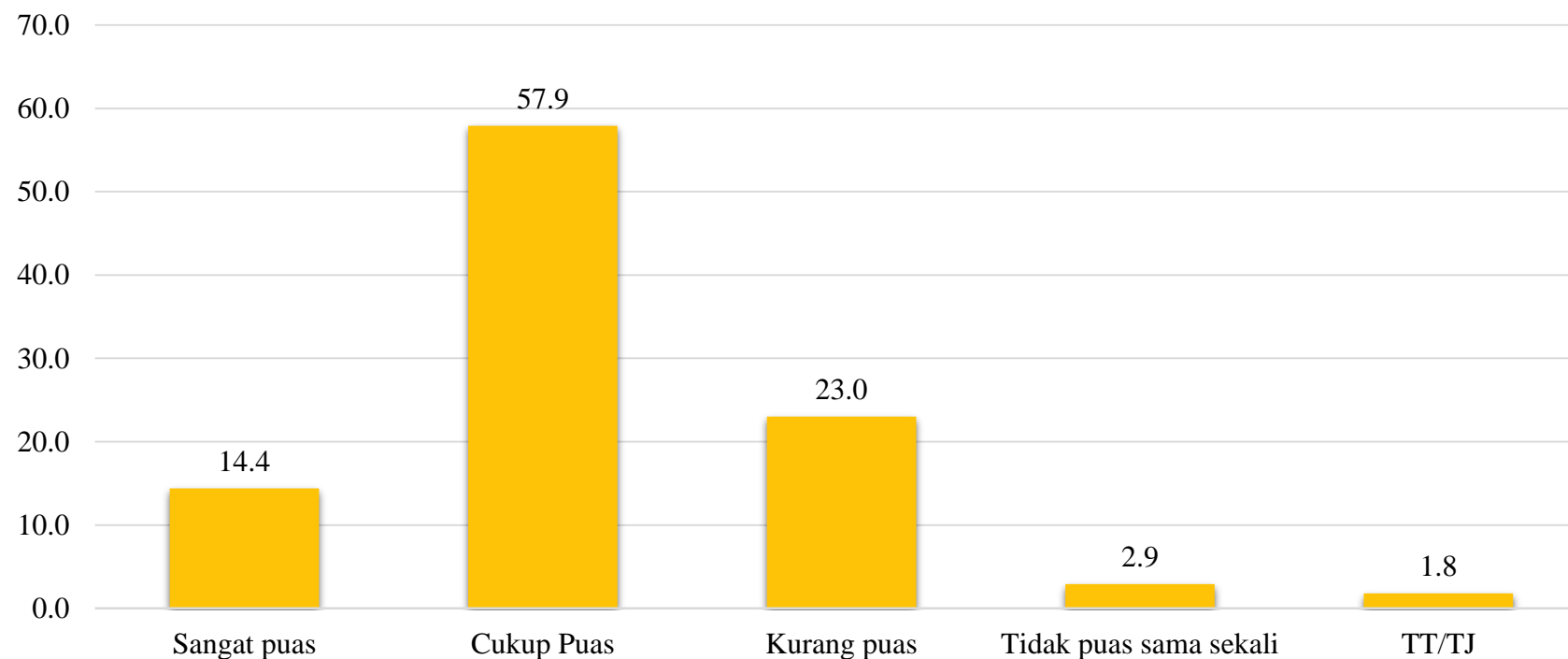
Menurut Ibu/Bapak mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan? (%)



EVALUASI KINERJA PRESIDEN

KINERJA PRESIDEN

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? (%)



Mayoritas merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi, 72.3%.

*KORELASI ANTARA EVALUASI WARGA TERHADAP KONDISI EKONOMI DENGAN KINERJA PRESIDEN

Correlations

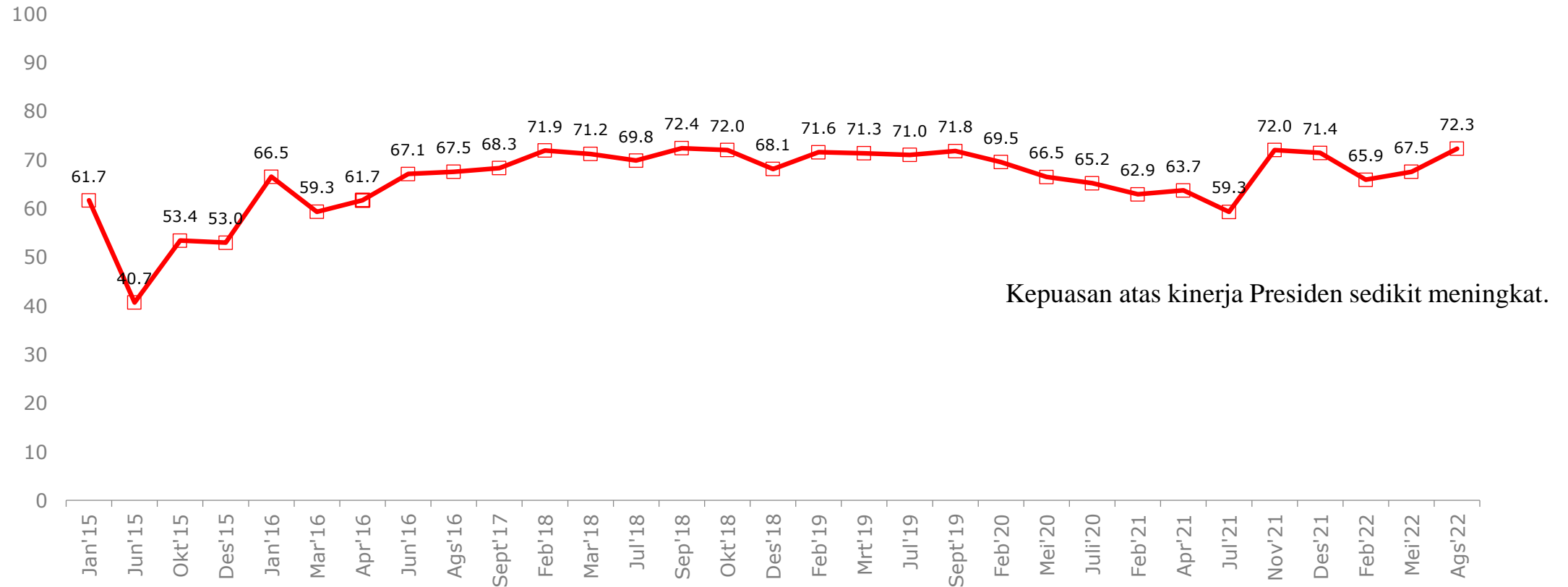
		Kondisi Ekonomi	Kondisi Politik	Kinerja Presiden
Kondisi Ekonomi	Pearson Correlation	1	.482**	.354**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	1209	1118	1192
Kondisi Politik	Pearson Correlation	.482**	1	.334**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	1118	1119	1112
Kinerja Presiden	Pearson Correlation	.354**	.334**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	1192	1112	1198

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Penilaian warga terhadap kondisi ekonomi nasional dan kondisi politik memiliki korelasi positif dan signifikan dengan kepuasan warga terhadap kinerja presiden.

**TT/TJ dimissingkan*

TREN PUAS ATAS KINERJA PRESIDEN



Sumber: LSI, Indikator

KINERJA PRESIDEN MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Sangat/cukup puas	Kurang/tidak puas sama sekali	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	49.6	74.5	24.5	1.0
Perempuan	50.4	70.1	27.2	2.7
USIA				
<= 21 tahun	13.0	84.8	13.9	1.3
22 - 25 tahun	9.0	79.2	20.8	0.0
26 - 40 tahun	36.4	66.2	32.8	1.0
41 - 55 tahun	25.5	71.8	25.9	2.3
> 55 tahun	16.0	72.9	22.7	4.4
ETNIS				
Jawa	41.0	78.5	20.2	1.3
Sunda	15.7	62.8	35.8	1.4
Batak	3.6	62.7	37.3	0.0
Madura	3.1	86.5	13.5	0.0
Betawi	2.9	54.4	45.6	0.0
Minang	3.1	57.5	35.2	7.4
Bugis	2.6	46.6	48.7	4.7
Melayu	2.3	59.5	36.8	3.6
Lainnya	25.6	75.4	22.1	2.5
AGAMA				
Islam	87.9	70.1	28.0	1.9
Protestan/Katolik	10.0	87.8	10.4	1.8
Lainnya	2.1	92.1	7.9	0.0

	BASE	Sangat/cukup puas	Kurang/tidak puas sama sekali	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	36.6	72.9	24.0	3.1
SLTP	18.1	75.2	23.8	0.9
SLTA	31.3	71.8	27.1	1.1
Kuliah	14.1	68.2	30.5	1.3
PEKERJAAN				
Petani/peternak/nelayan	15.3	82.1	17.1	0.7
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	26.0	69.2	27.6	3.2
Wiraswasta, pengusaha	7.9	68.1	31.9	0.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	12.3	82.1	17.5	0.4
Ibu Rumah Tangga	26.1	62.2	36.4	1.4
Masih sekolah/kuliah	7.5	87.9	12.1	0.0
Lainnya	4.9	70.2	20.4	9.4
PENDAPATAN				
< 1 juta	26.1	74.9	21.4	3.7
1 - < 2 juta	28.4	76.9	21.9	1.2
2 - < 4 juta	29.5	67.2	31.9	0.8
=> 4 juta	16.0	69.2	28.9	1.8

Mayoritas merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi di hampir semua kelompok demografi, kecuali di wilayah Banten.

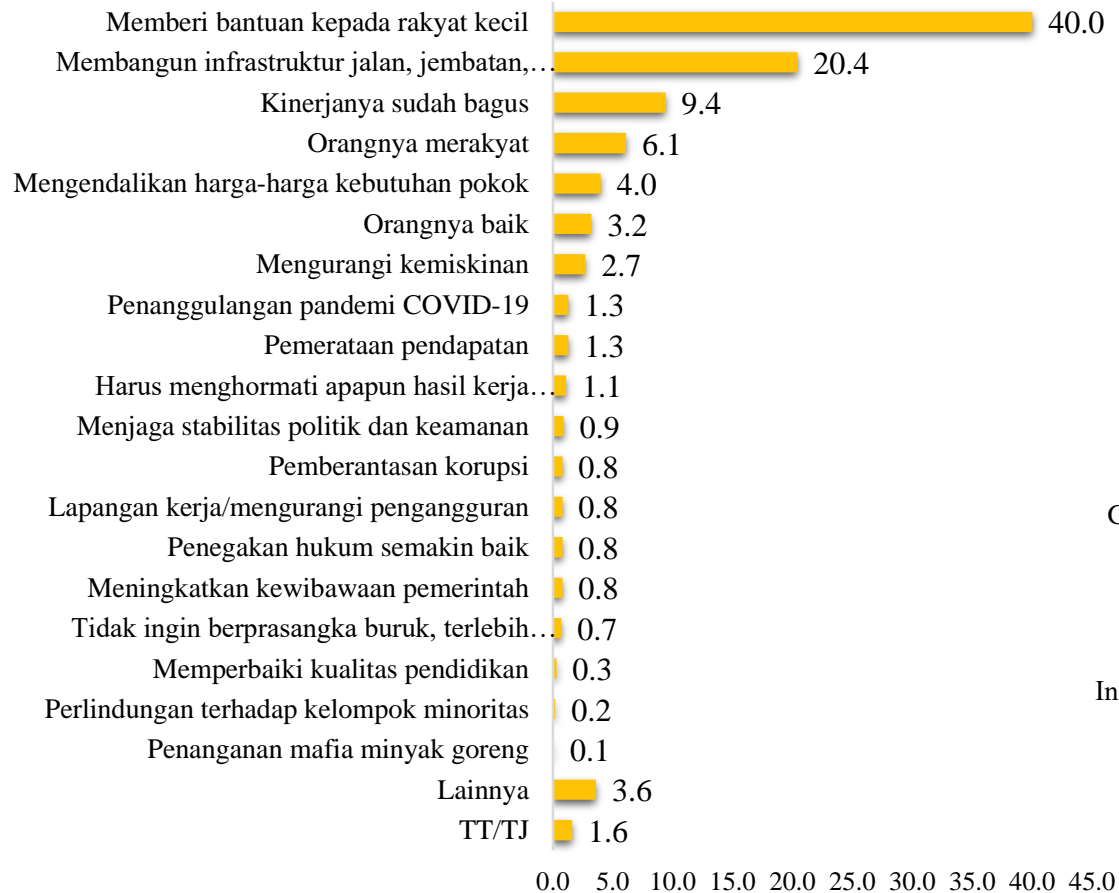
KINERJA PRESIDEN MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Sangat/cukup puas	Kurang/tidak puas sama sekali	TT/TJ
DESA/KOTA				
Pedesaan	50.0	75.1	23.7	1.2
Perkotaan	50.0	69.5	28.0	2.5
WILAYAH				
SUMATERA	20.4	67.0	31.4	1.5
BANTEN	4.3	42.6	57.4	0.0
DKI	4.1	63.5	36.5	0.0
JABAR	17.4	66.6	29.5	3.9
JATENG DIY	16.1	79.3	18.6	2.1
JATIM	16.2	82.9	16.3	0.8
BALI NUSA	5.3	94.1	5.9	0.0
KALIMANTAN	5.9	69.5	30.5	0.0
SULAWESI	7.0	73.0	22.4	4.6
MALUKU PAPUA	3.3	66.1	32.7	1.3

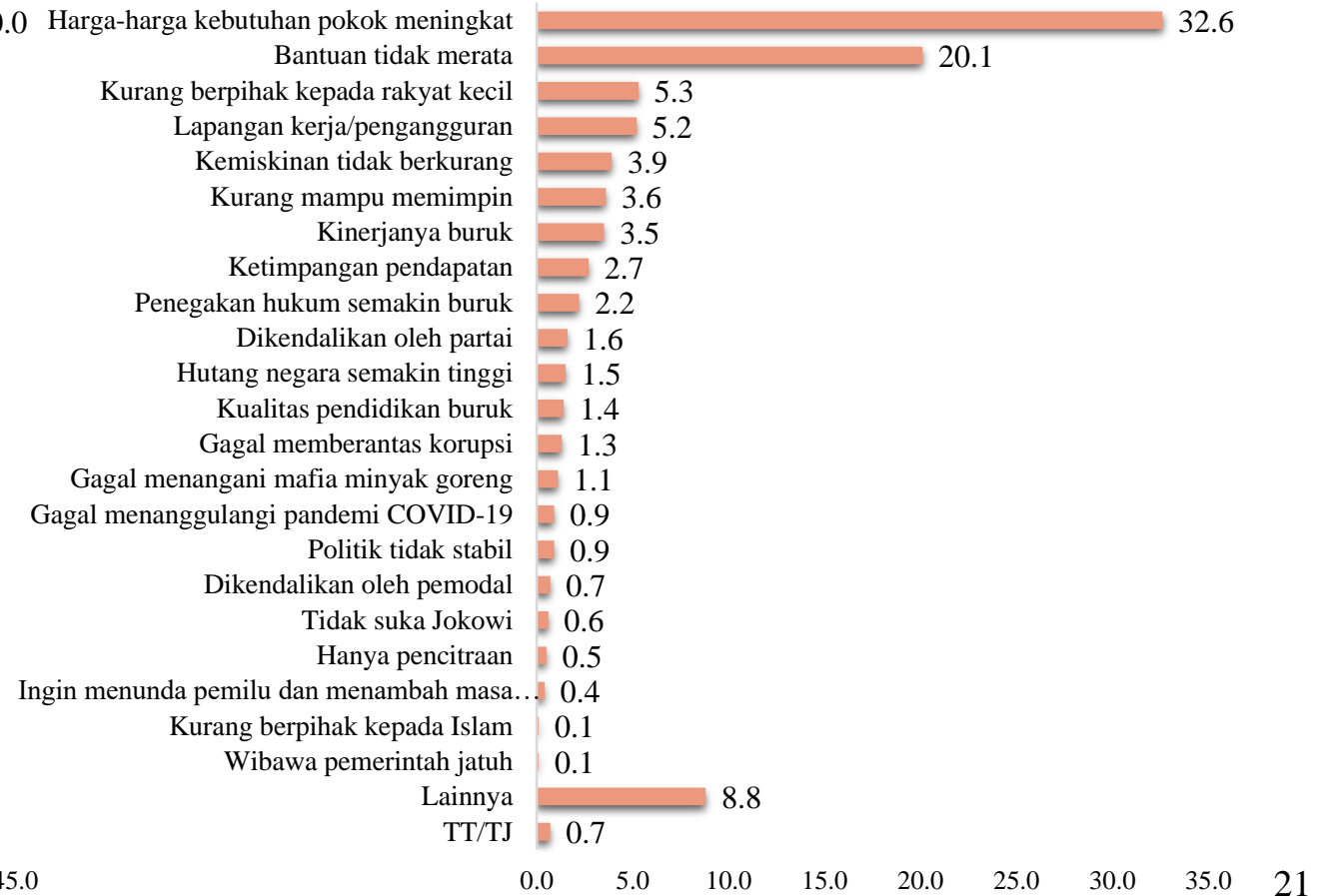
Mayoritas merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi di hampir semua kelompok demografi, kecuali di wilayah Banten.

ALASAN PUAS DAN TIDAK PUAS DENGAN KINERJA PRESIDEN

Alasan Puas (%)



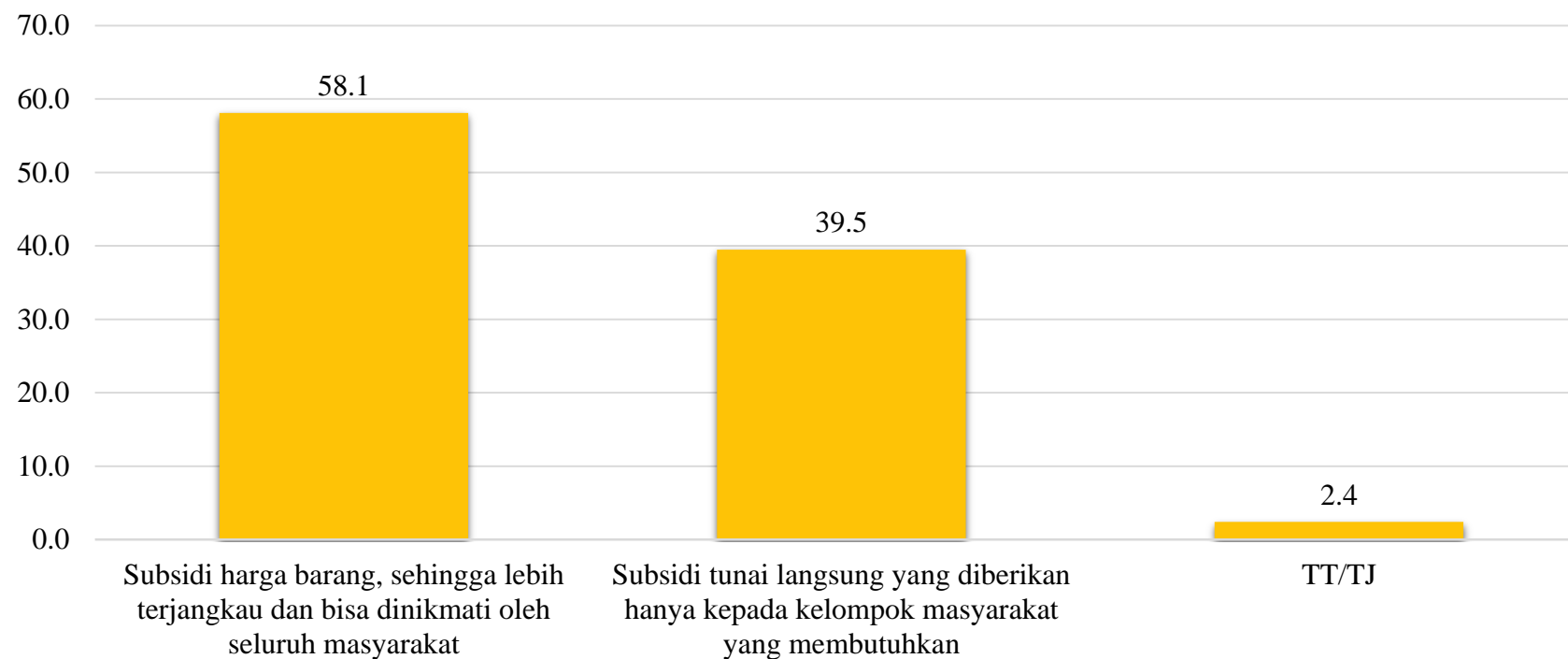
Alasan Tidak Puas (%)



EKONOMI, PAJAK, DAN PERTANAHAN

SUBSIDI HARGA BARANG VS SUBSIDI TUNAI

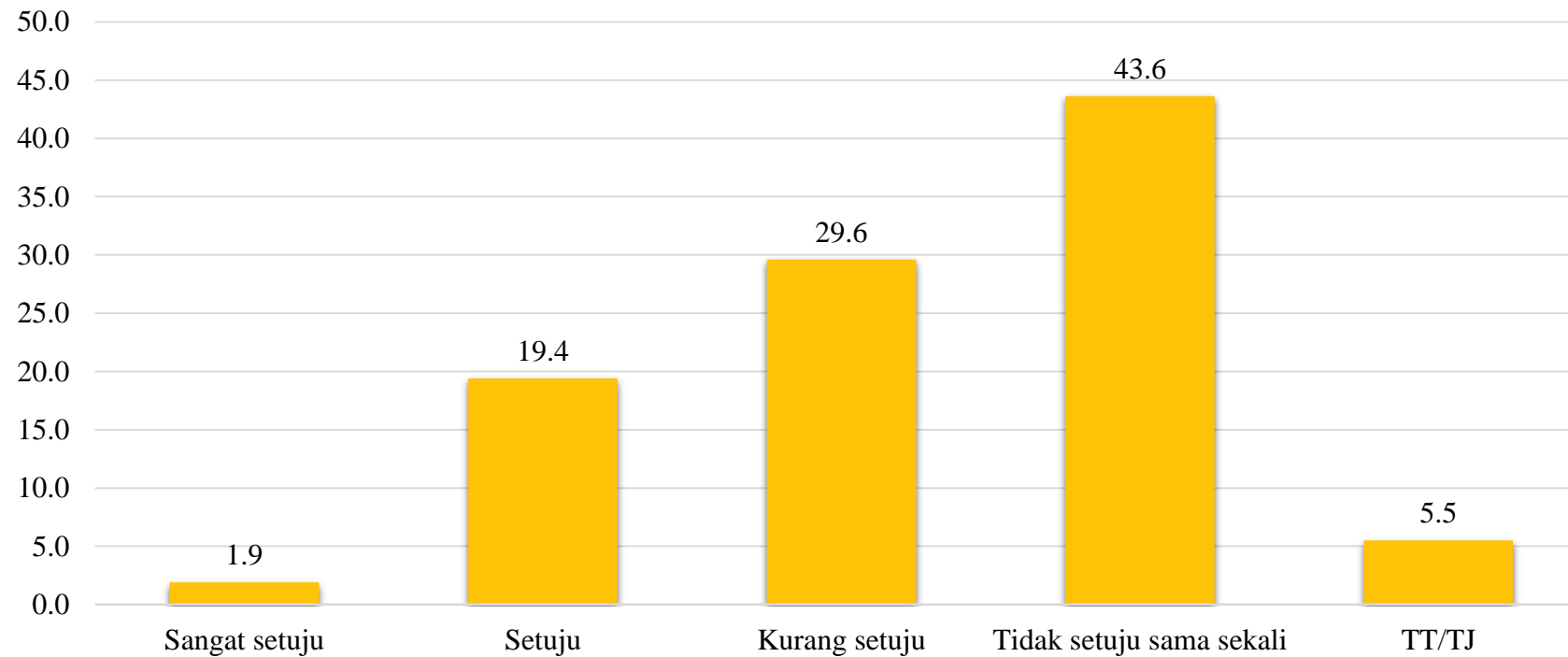
Di antara dua cara pemberian subsidi kepada masyarakat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri? (%)



Mayoritas lebih sesuai dengan pendapat subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI MYPERTAMINA UNTUK PEMBELIAN PERTALITE DAN SOLAR

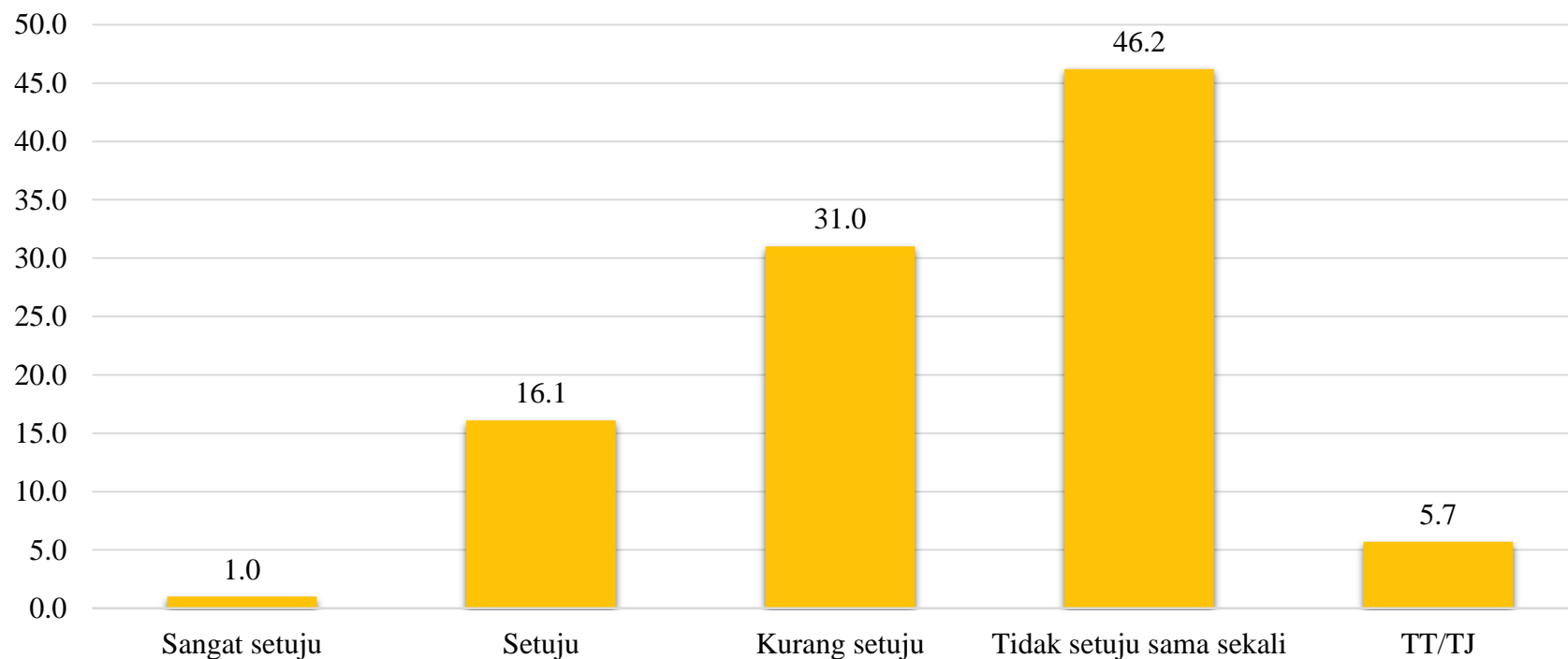
Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina, agar dapat diketahui mana kelompok warga yang berhak mendapatkan Pertalite dan Solar secara tepat sasaran. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan tersebut? (%)



Mayoritas kurang/tidak setuju kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI UNTUK PEMBELIAN MINYAK GORENG CURAH

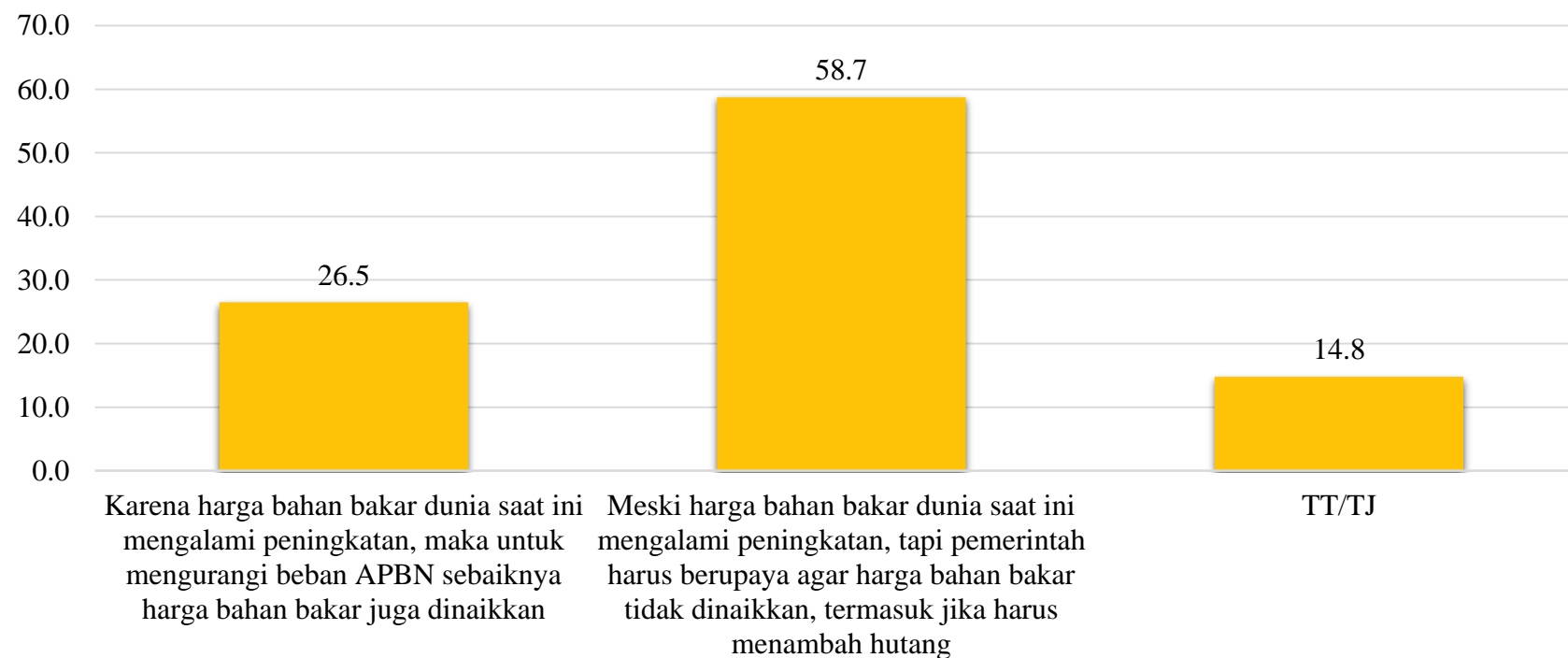
Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi, agar dapat dipastikan ketersediaan dan keterjangkauan harganya bagi masyarakat secara tepat sasaran. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan tersebut? (%)



Mayoritas kurang/tidak setuju kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

HARGA BBM DINAIKKAN UNTUK MENGURANGI BEBAN APBN VS TIDAK DINAIKKAN MESKI HARUS MENAMBAH HUTANG

Di antara pendapat berikut mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri? (%)

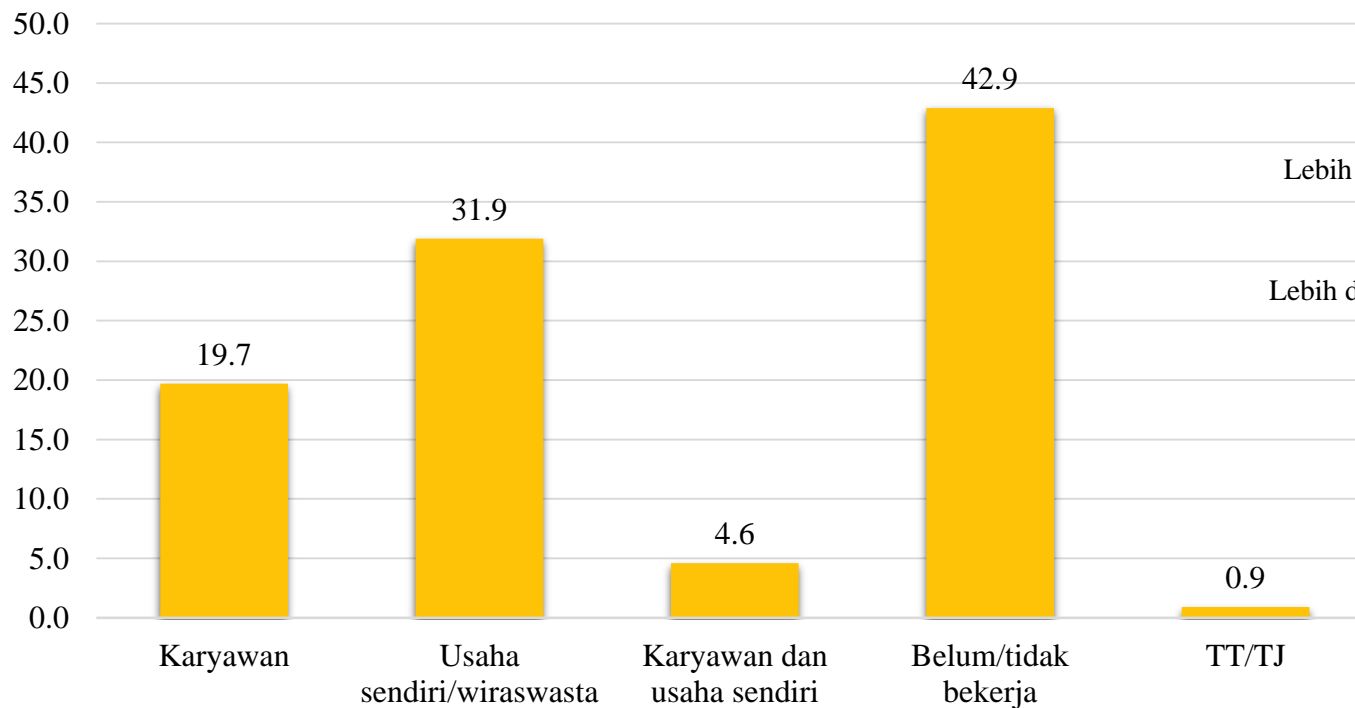


Lebih banyak yang berpendapat bahwa harga bahan bakar tidak dinaikkan meski harus menambah hutang.

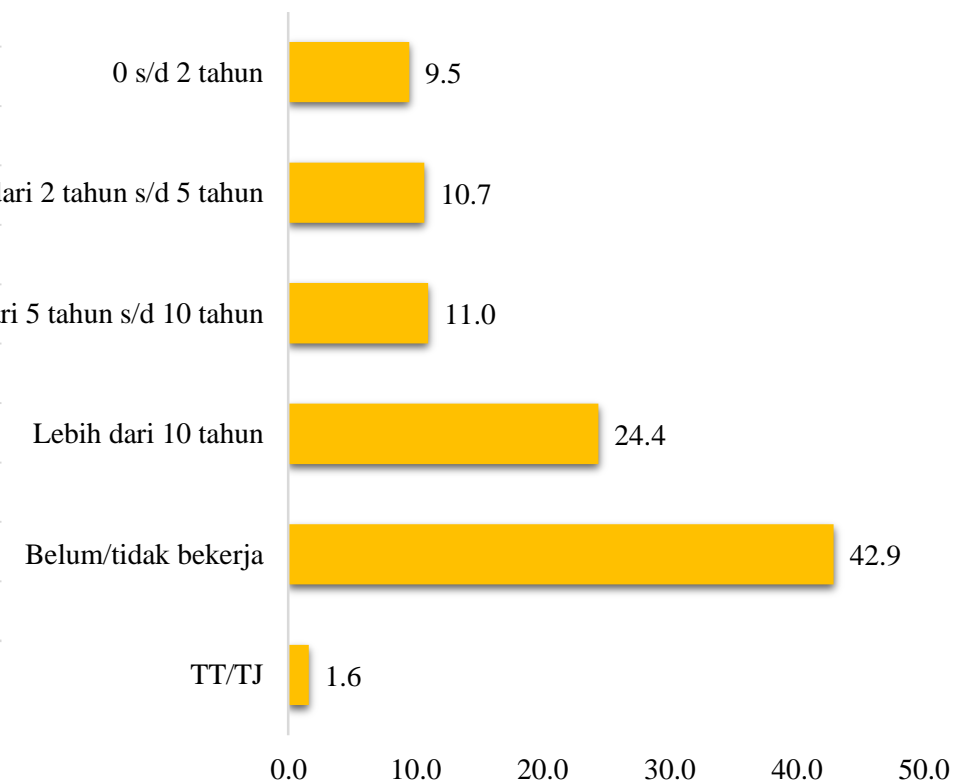
PERPAJAKAN

STATUS PEKERJAAN

Tolong Ibu/Bapak sebutkan status pekerjaan Ibu/Bapak? (%)

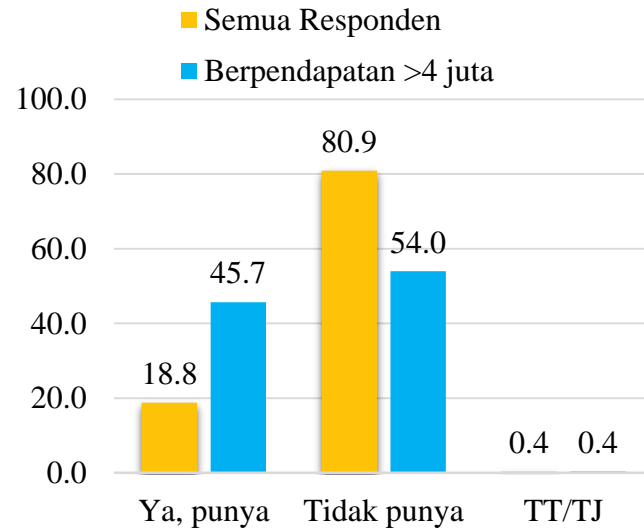


Sudah berapa lama Ibu/Bapak menjalani pekerjaan tersebut? (%)

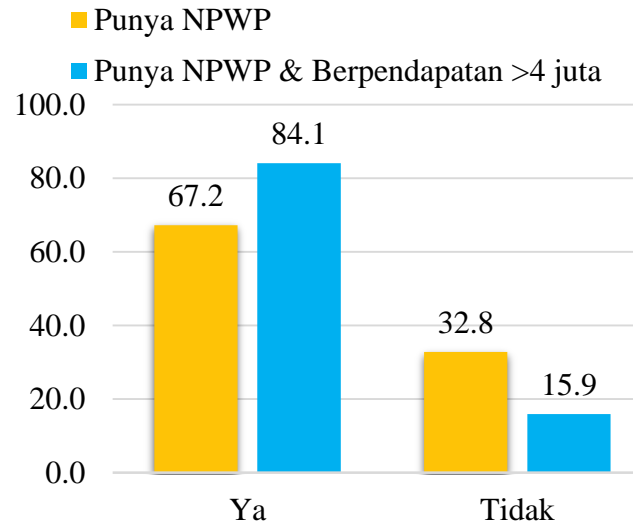


KEPEMILIKAN NPWP

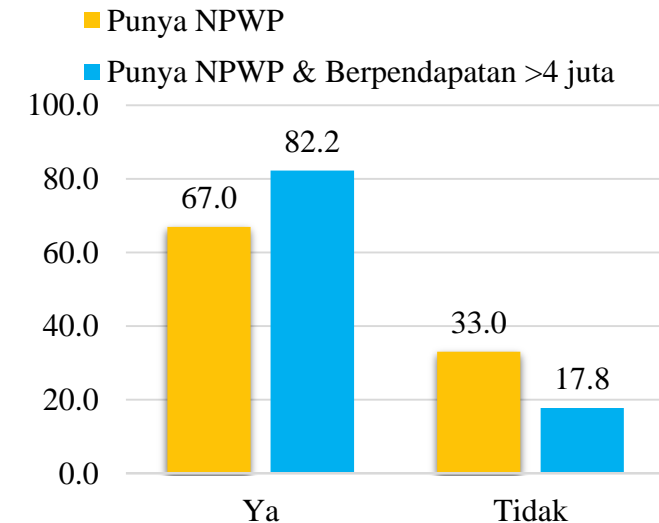
Apakah Ibu/Bapak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? (%)



Apakah Ibu/Bapak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan SPT Tahunan PPh)?(%)
(Base: Memiliki NPWP)



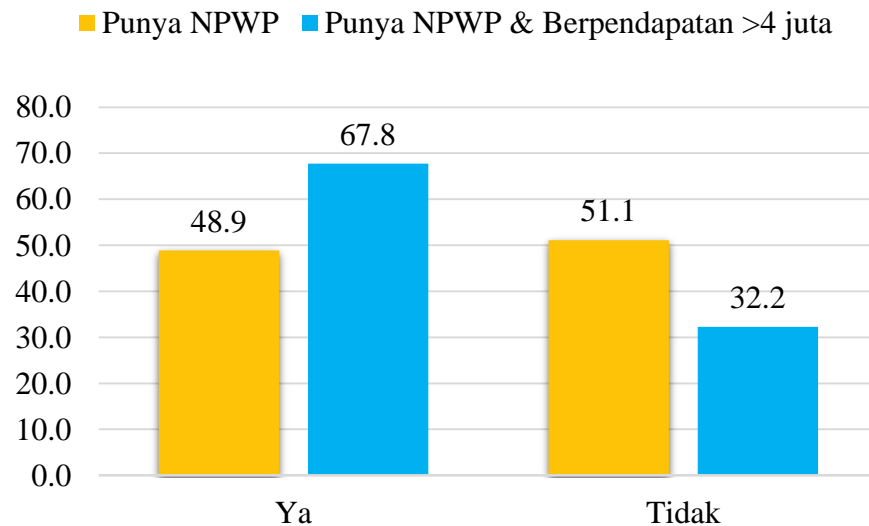
Apakah Ibu/Bapak membayar Pajak Penghasilan (PPh) (baik orang pribadi ataupun badan), baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat Ibu/Bapak bekerja?(%)
(Base: Memiliki NPWP)



Sekitar 19% mengaku punya NPWP, dari yang punya NPWP mayoritas menyampaikan SPT dan membayar pajak PPh.

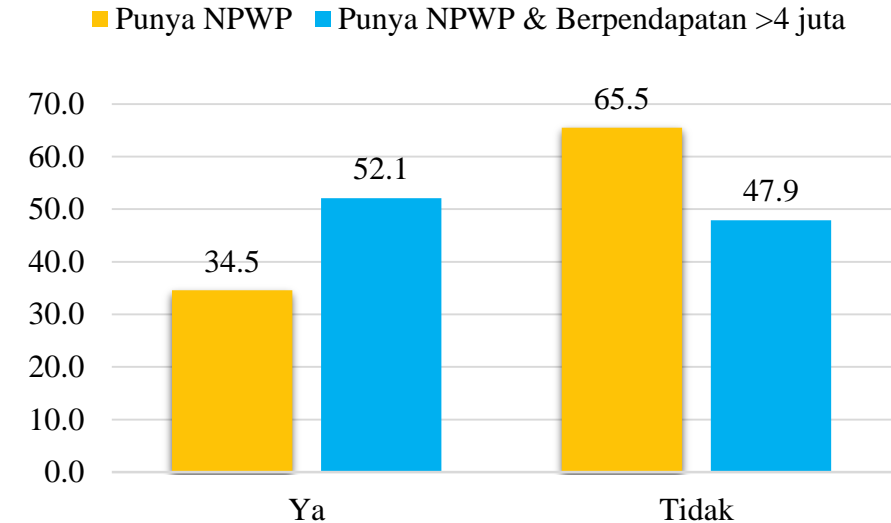
AWARENESS WARGA TERHADAP KEBIJAKAN ORANG YANG BERPENGHASILAN HINGGA RP 4.5 JUTA/BULAN TIDAK KENA PAJAK DAN KEBIJAKAN MENGURANGI BEBAN PAJAK ORANG PRIBADI

Sebagai wajib pajak Orang Pribadi, apakah Ibu/Bapak mengetahui atau pernah dengar bahwa pemerintah menetapkan orang yang berpenghasilan hingga Rp. 4.5 juta/bulan tidak kena kena pajak? (%) **(Base: Memiliki NPWP)**



Dari yang memiliki NPWP, sekitar 49% tahu bahwa pemerintah menetapkan orang yang berpenghasilan hingga Rp. 4.5 juta/bulan tidak kena kena pajak.

Apakah Ibu/Bapak mengetahui atau pernah dengar bahwa pemerintah mengurangi beban pajak dengan hanya menerapkn tarif pajak sebesar 5% kepada Orang Pribadi yang berpenghasilan hinggann Rp. 60 juta/tahun (>4.5 juta s/d 5 juta/bulan)? (%) **(Base: Memiliki NPWP)**

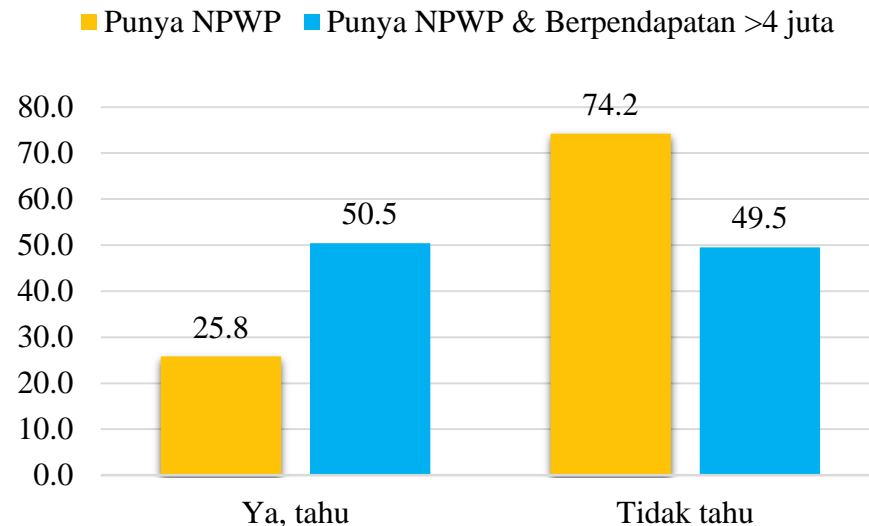


Dari yang memiliki NPWP, mayoritas, 65.5%, tidak tahu bahwa pemerintah mengurangi beban pajak dengan hanya menerapkan tarif pajak sebesar 5% kepada Orang Pribadi yang berpenghasilan hinggann Rp. 60 juta/tahun (>4.5 juta s/d 5 juta/bulan).

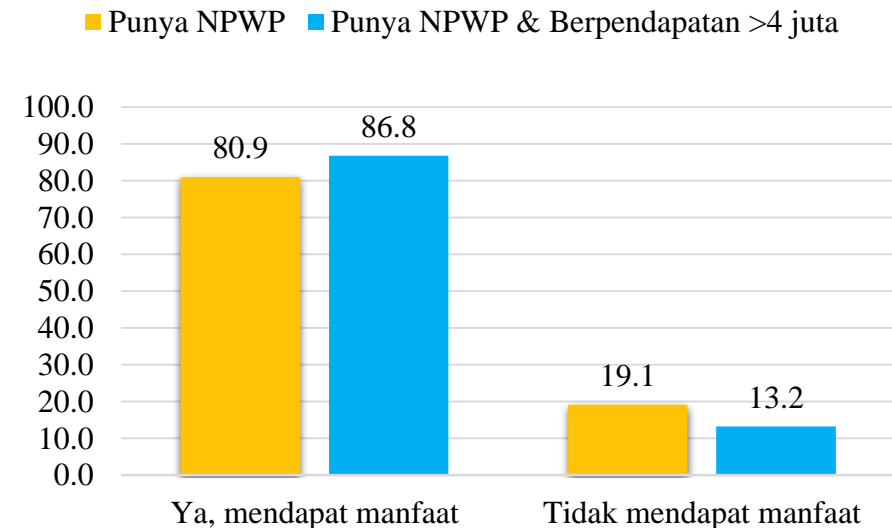
30

AWARENESS WARGA TERHADAP KEBIJAKAN ORANG YANG BERPENGHASILAN HINGGA RP 4.5 JUTA/BULAN TIDAK KENA PAJAK DAN KEBIJAKAN MENGURANGI BEBAN PAJAK ORANG PRIBADI

Khusus wiraswasta/usaha sendiri, Apakah Ibu/Bapak mengetahui atau pernah dengar bahwa tarif PPh final atas kegiatan usaha UMKM dengan omset hingga 4.8 miliar telah diturunkan dari 1% menjadi 0.5%? (%)
(Base: Memiliki NPWP)



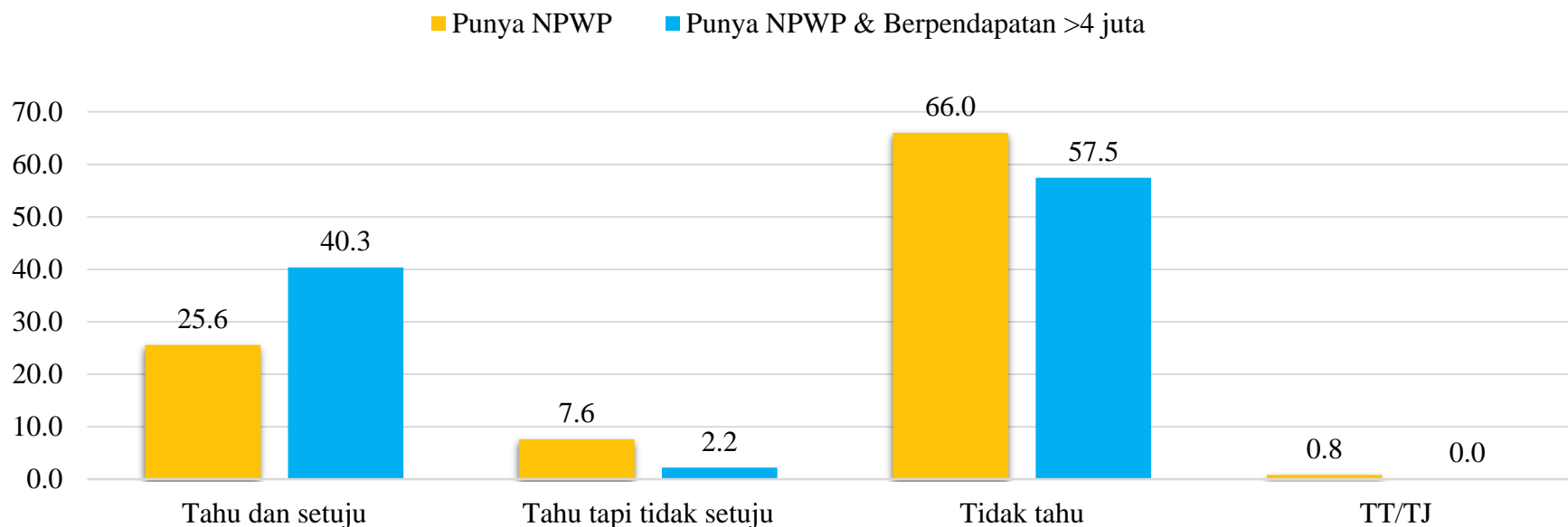
Jika tahu, apakah Ibu/Bapak merasa mendapatkan manfaat bagi kegiatan usaha Ibu/Bapak? (%) **(Base: Tahu berita)**



Dari yang wiraswasta/usaha sendiri, sekitar 26% sudah mengetahui atau pernah dengar bahwa tarif PPh final atas kegiatan usaha UMKM dengan omset hingga 4.8 miliar telah diturunkan dari 1% menjadi 0.5%. Dari yang tahu mayoritas merasa mendapat manfaat.

AWARENESS DAN DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM HINGGA 500 JUTA TIDAK DIKENAKAN TARIF PPH FINAL

Khusus wiraswasta/usaha sendiri, Apakah Ibu/Bapak mengetahui atau pernah dengar bahwa mulai tahun 2022 ini omset usaha Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 500 juta tidak dikenakan tarif PPh final dan apakah Ibu/Bapak setuju? (%)
(Base: Memiliki NPWP)

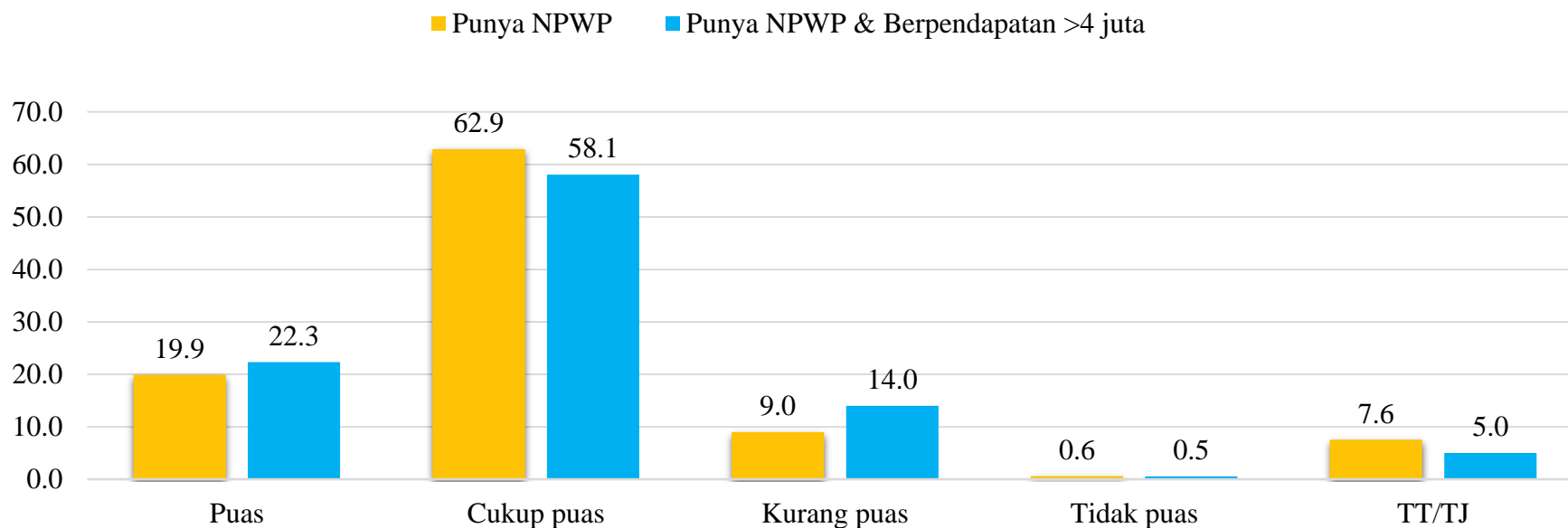


Dari yang wiraswasta/usaha sendiri, mayoritas tidak tahu, sementara hanya 25.6% yang tahu dan setuju bahwa mulai tahun 2022 ini omset usaha Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 500 juta tidak dikenakan tarif PPh final.

EVALUASI TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK

Seberapa puas Ibu/Bapak dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak ketika Ibu/Bapak berhubungan/berurusan dengan kantor pajak, apakah puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas? (%)

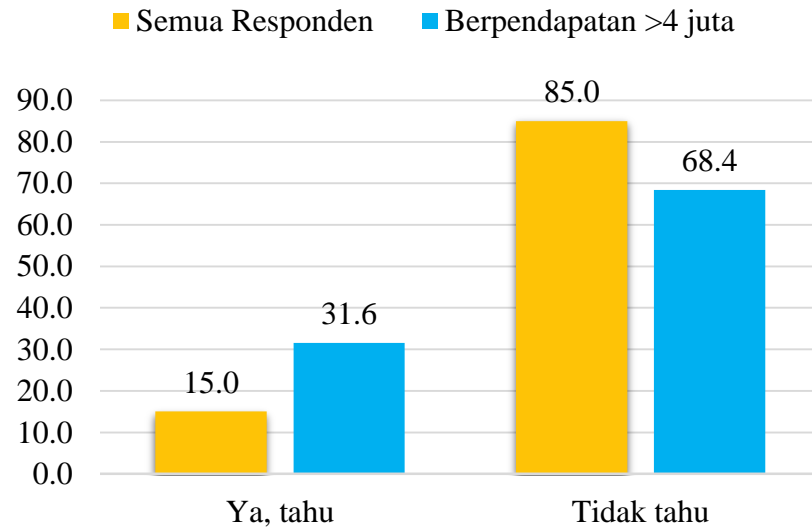
(Base: Memiliki NPWP)



Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak.

NIK MENJADI PENGANTI NPWP

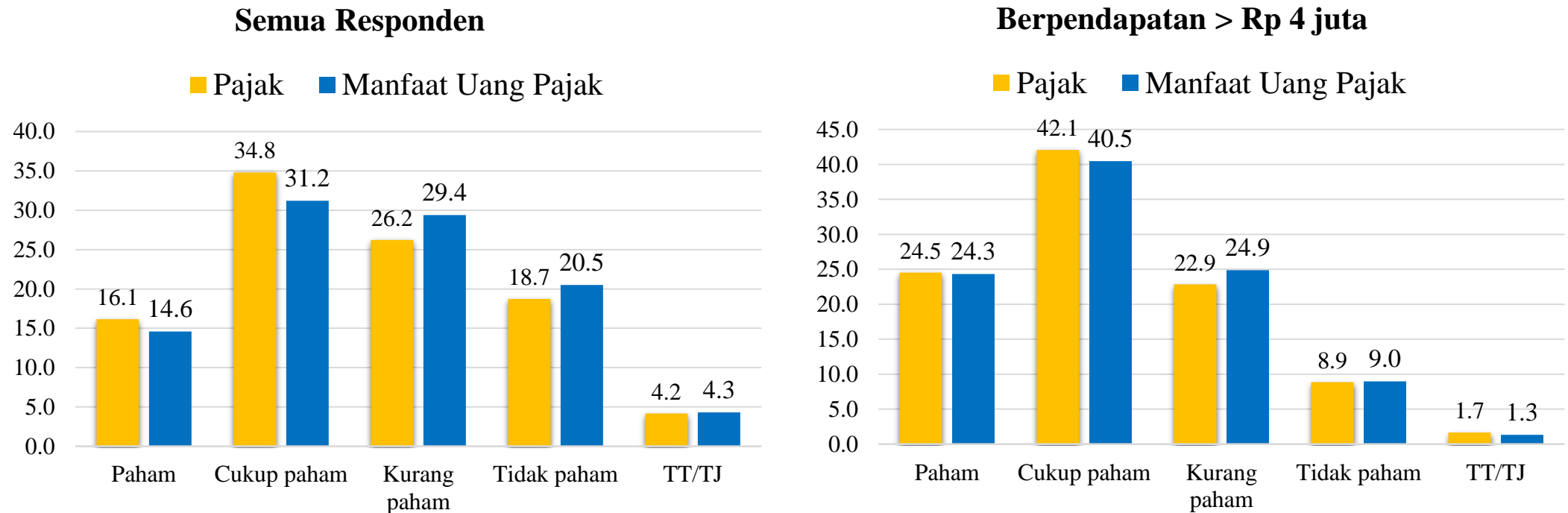
Apakah Ibu/Bapak mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? (%)



Hanya 15% yang tahu bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PEMAHAMAN PUBLIK TERHADAP PAJAK DAN MANFAAT UANG PAJAK

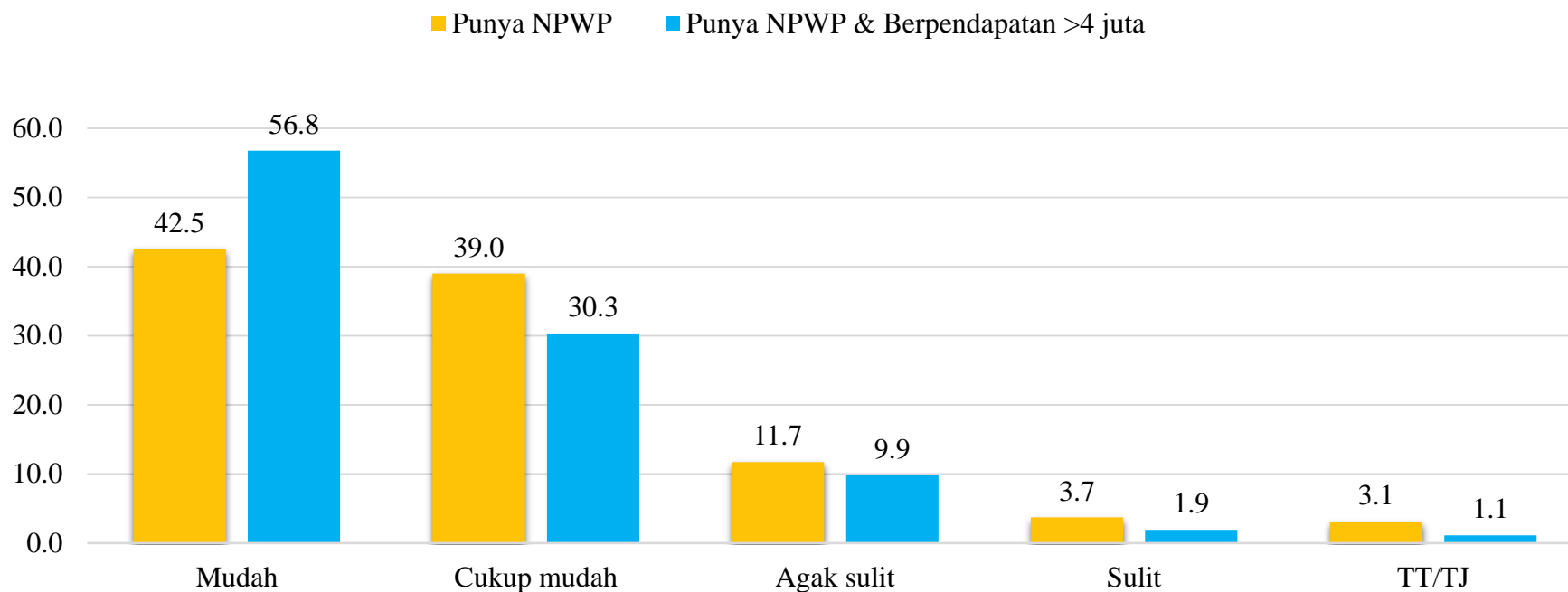
Apakah Ibu/Bapak paham, cukup paham, kurang paham atau tidak paham ... ? (%)



Publik yang merasa paham/cukup paham dengan pajak lebih banyak dibanding yang kurang/tidak paham, sementara yang kurang paham/tidak paham dengan manfaat uang pajak relative sama dengan yang paham/cukup paham.

KEMUDAHAN MENUNAIKAN PAJAK (BASE: MEMILIKI NPWP)

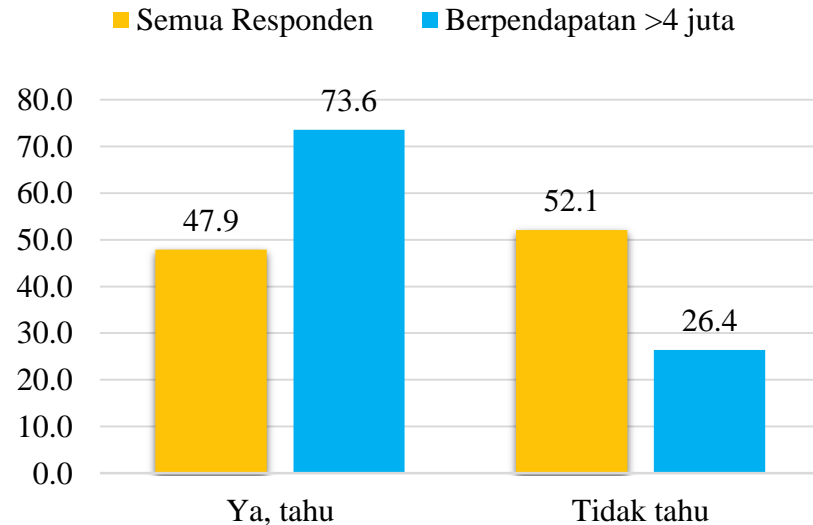
Apakah Ibu/Bapak merasa mudah, cukup mudah, agak sulit atau sulit dalam menunaikan kewajiban perpajakan Ibu/Bapak sendiri? (%)



Mayoritas merasa mudah/cukup mudah dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

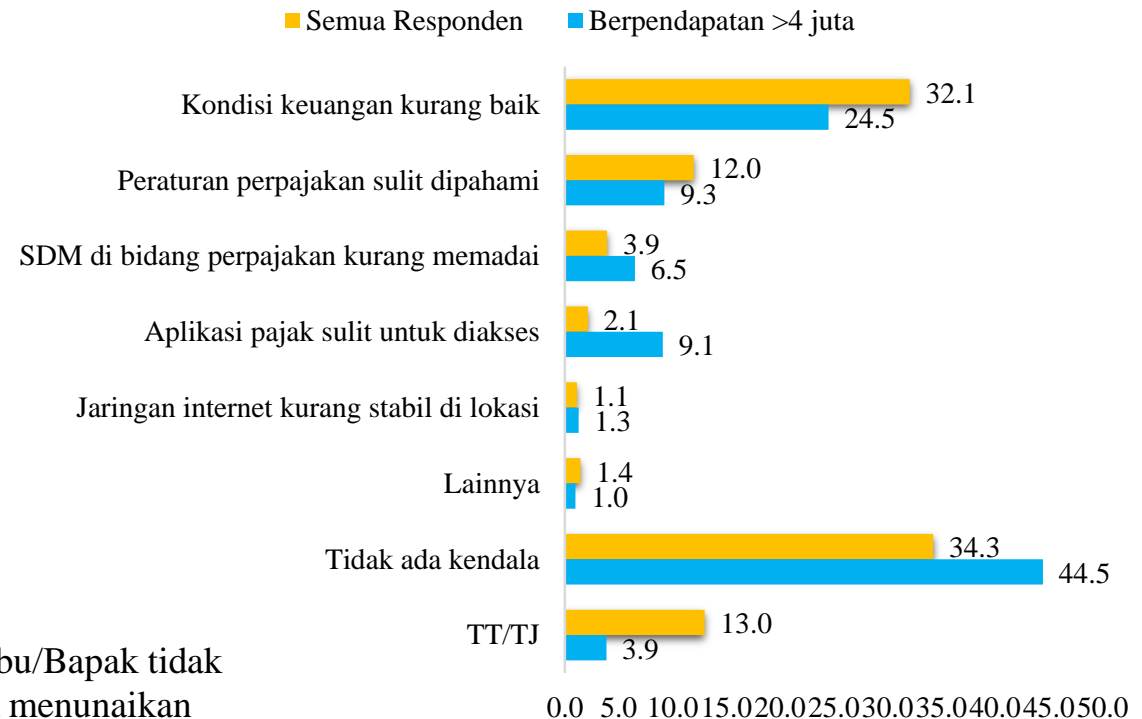
ADANYA SANKSI JIKA TIDAK MEMBAYAR PAJAK DAN KENDALA YANG DIALAMI

Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan? (%)



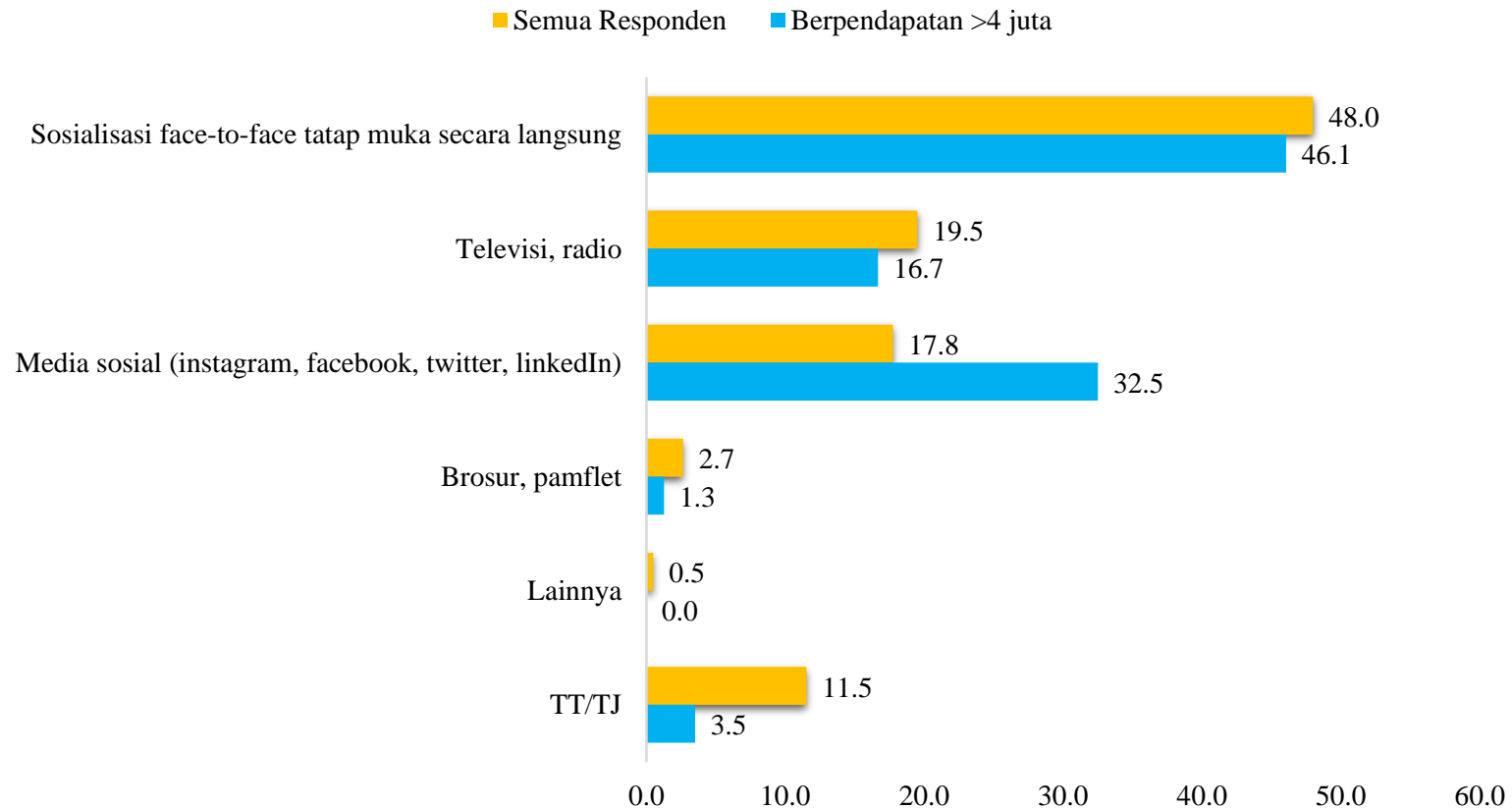
Sekitar 48% tahu adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan. Kendala utama dalam menunaikan kewajiban perpajakan adalah kondisi keuangan yang kurang baik.

Apakah kendala utama Ibu/Bapak dalam menunaikan kewajiban perpajakan? (%)



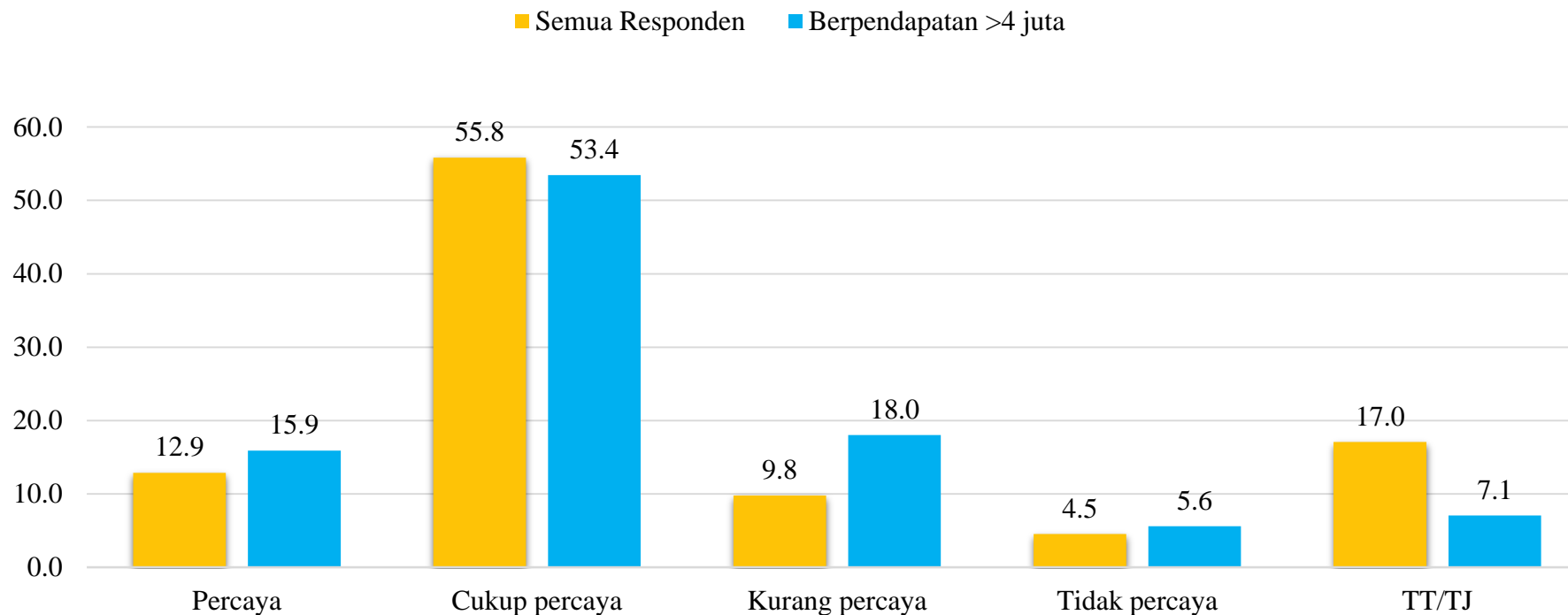
MEDIA PALING EFEKTIF MENYAMPAIKAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

Menurut Ibu/Bapak, media apa yang paling efektif untuk menyampaikan sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan? (%)



PAJAK MERUPAKAN BENTUK DARI PRINSIP GOTONG ROYONG

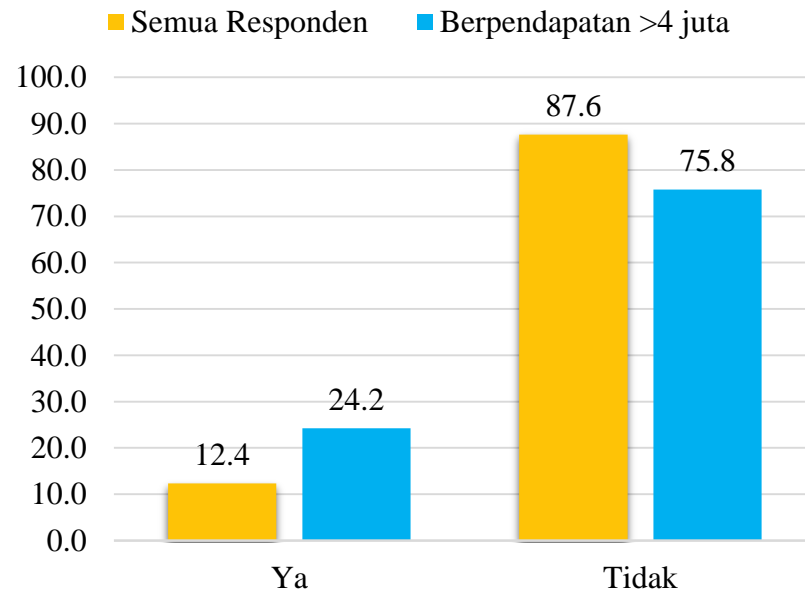
Apakah Ibu/Bapak percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong? (%)



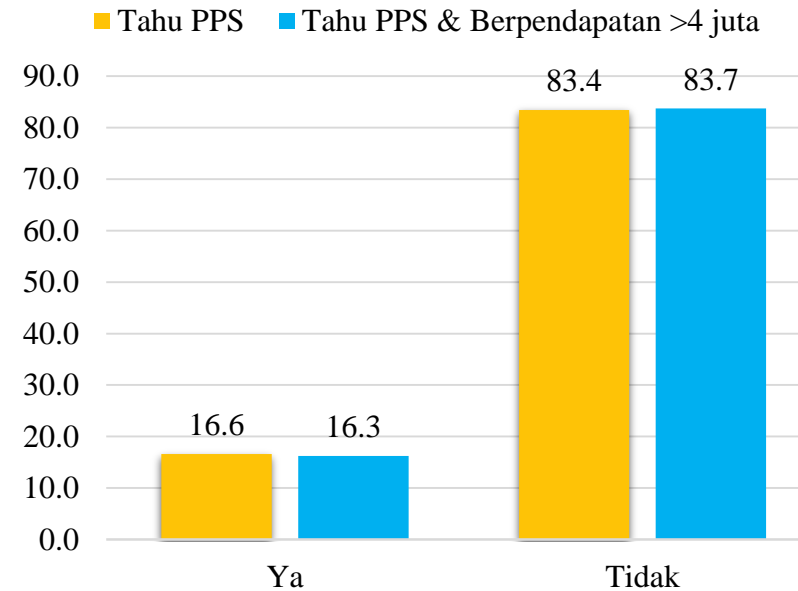
Mayoritas cukup percaya/percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong.

TAX AMNESTY

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty)? (%)



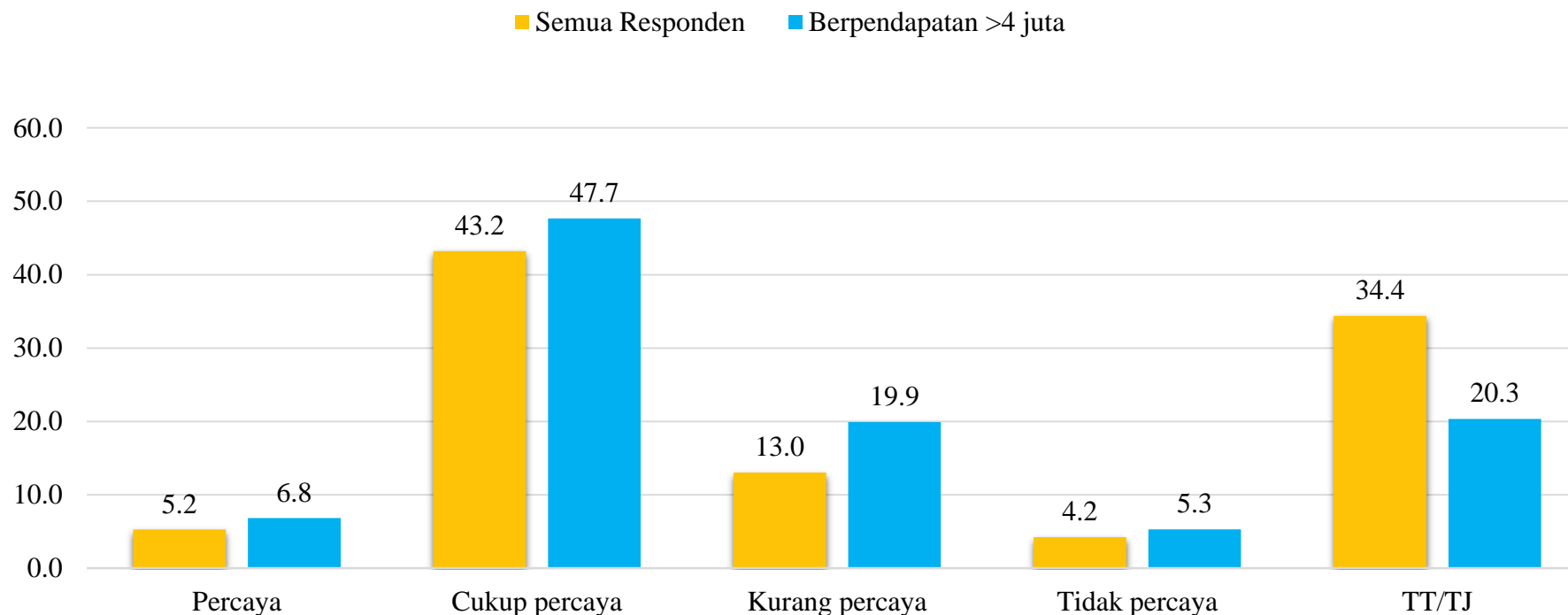
Apakah Ibu/Bapak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut?(%)
(Base: Tahu PPS)



Sekitar 12% tahu PPS, dari yang tahu sekitar 16.6% mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut.

TAX AMNESTY AKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

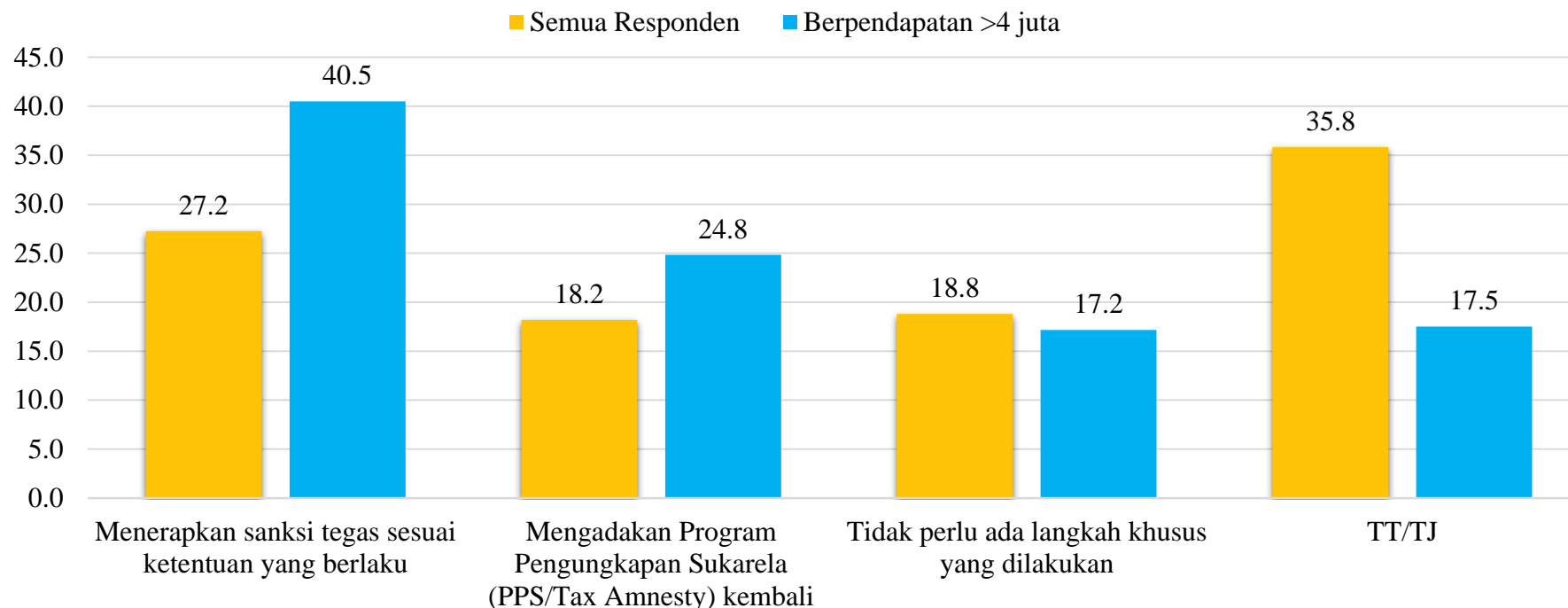
Apakah Ibu/Bapak percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak? (%)



Kebanyakan percaya/ cukup percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

LANGKAH LANJUTAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGIKUTI TAX AMNESTY

Menurut Ibu/Bapak, langkah lanjutan apa yang harus dilakukan oleh otoritas pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty)? (%)

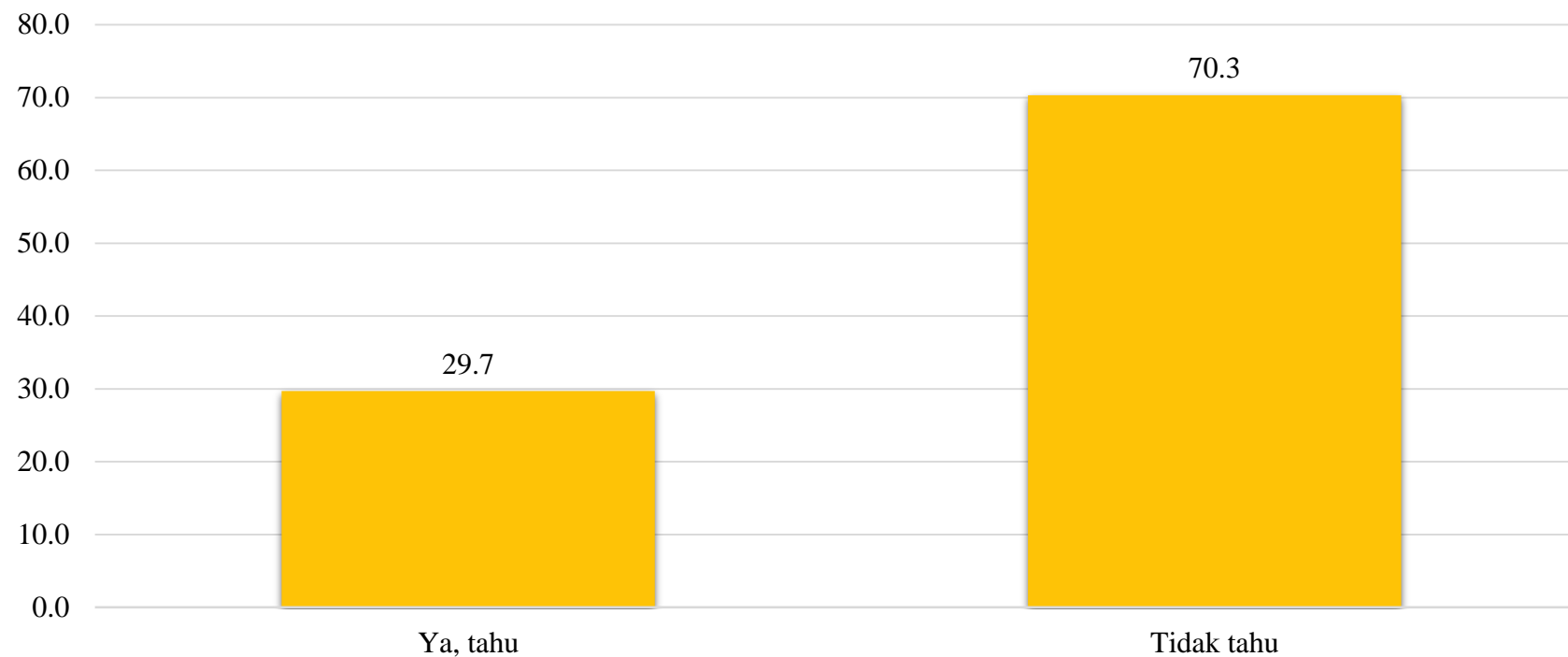


Kebanyakan menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan berlaku.

PERTANAHAN

AWARENESS TERHADAP PTSL

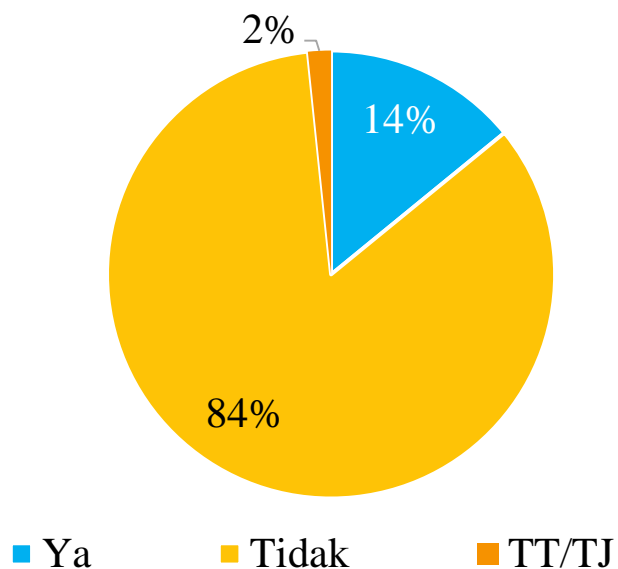
Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)? (%)



Sekitar 29.7% pernah dengar program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

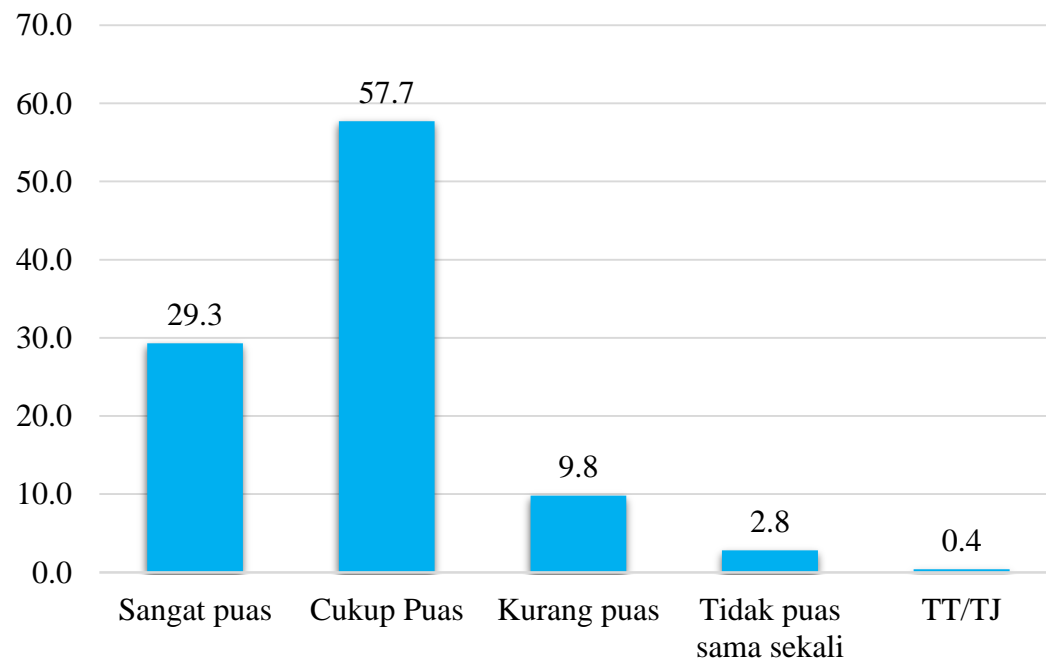
MEMBUAT SERTIFIKAT PROGRAM PTSL

Apakah Ibu/Bapak mengajukan pembuatan sertifikat tanah atau menjadi peserta program PTSL tersebut? (%)



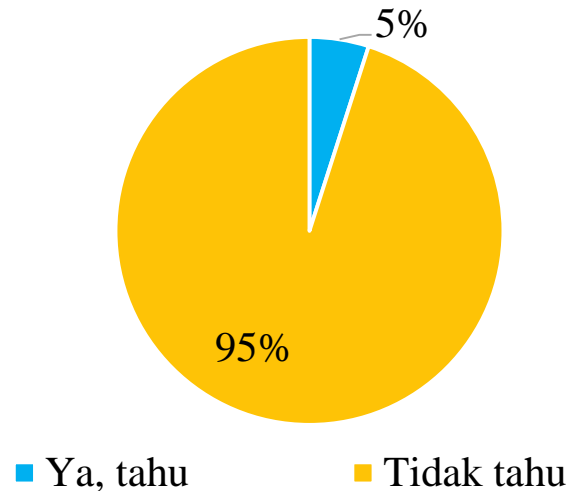
Sekitar 14% mengajukan pembuatan sertifikat tanah atau menjadi peserta program PTSL tersebut, dari yang tahu mayoritas puas dengan program PTSL tersebut.

Jika ya, apakah Ibu/Bapak merasa sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan program PTSL tersebut? (%)
(Base: Mengajukan PTSL)



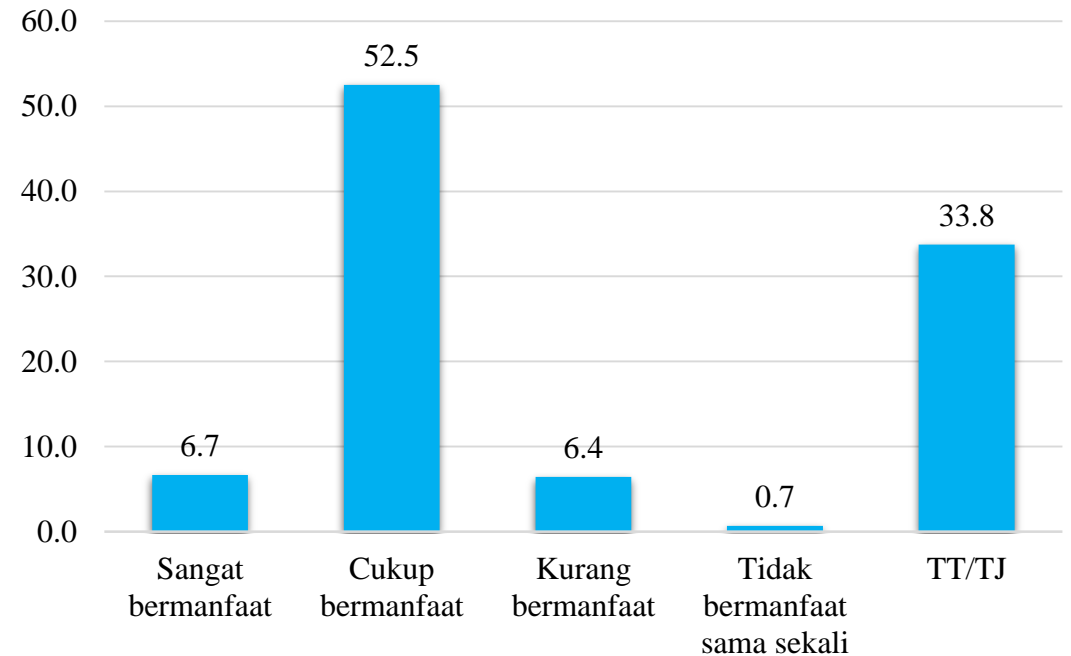
PROGRAM PELATARAN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang baru diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto belum lama ini? [Program PELATARAN yaitu program pelayanan pertanahan yang dibuka pada hari Sabtu dan Minggu pukul 08:00-12:00 waktu setempat] (%)



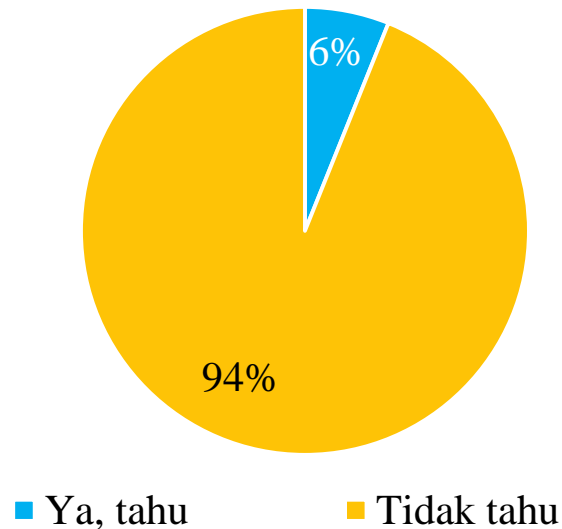
Hanya 5% yang tahu, mayoritas menilai PELATARAN bermanfaat.

Menurut Ibu/Bapak seberapa bermanfaat program PELATARAN tersebut bagi masyarakat dalam urusan pertanahan? (%)



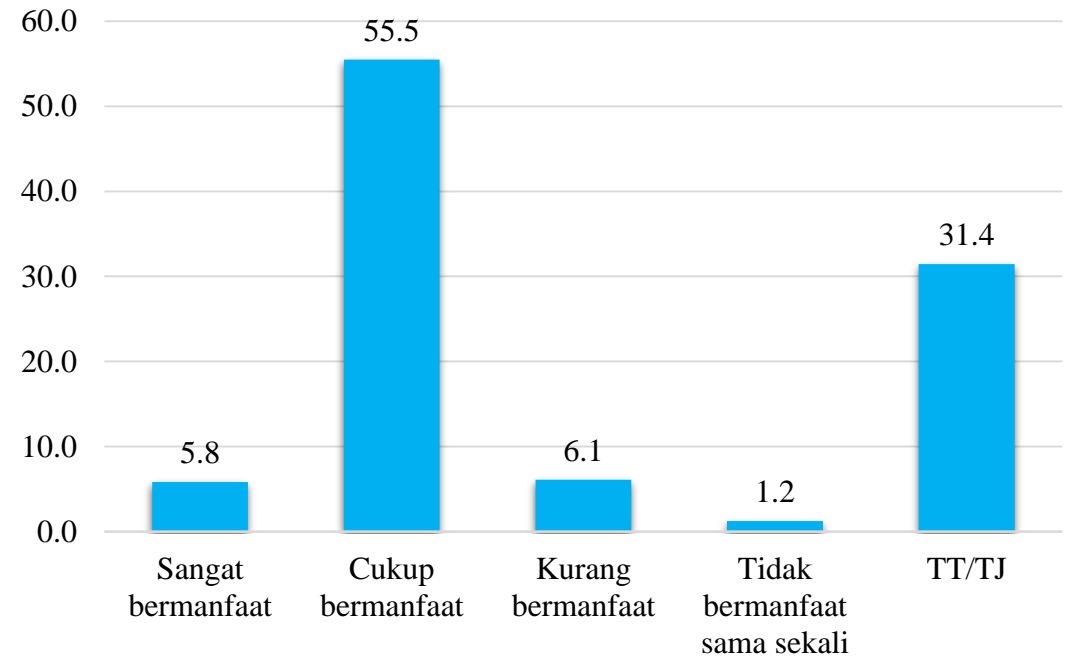
HOTLINE PENGADUAN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Hotline Pengaduan yang juga baru diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto belum lama ini? [Program Hotline Pengaduan yaitu layanan pengaduan dan informasi masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang melalui aplikasi WhatsApp] (%)



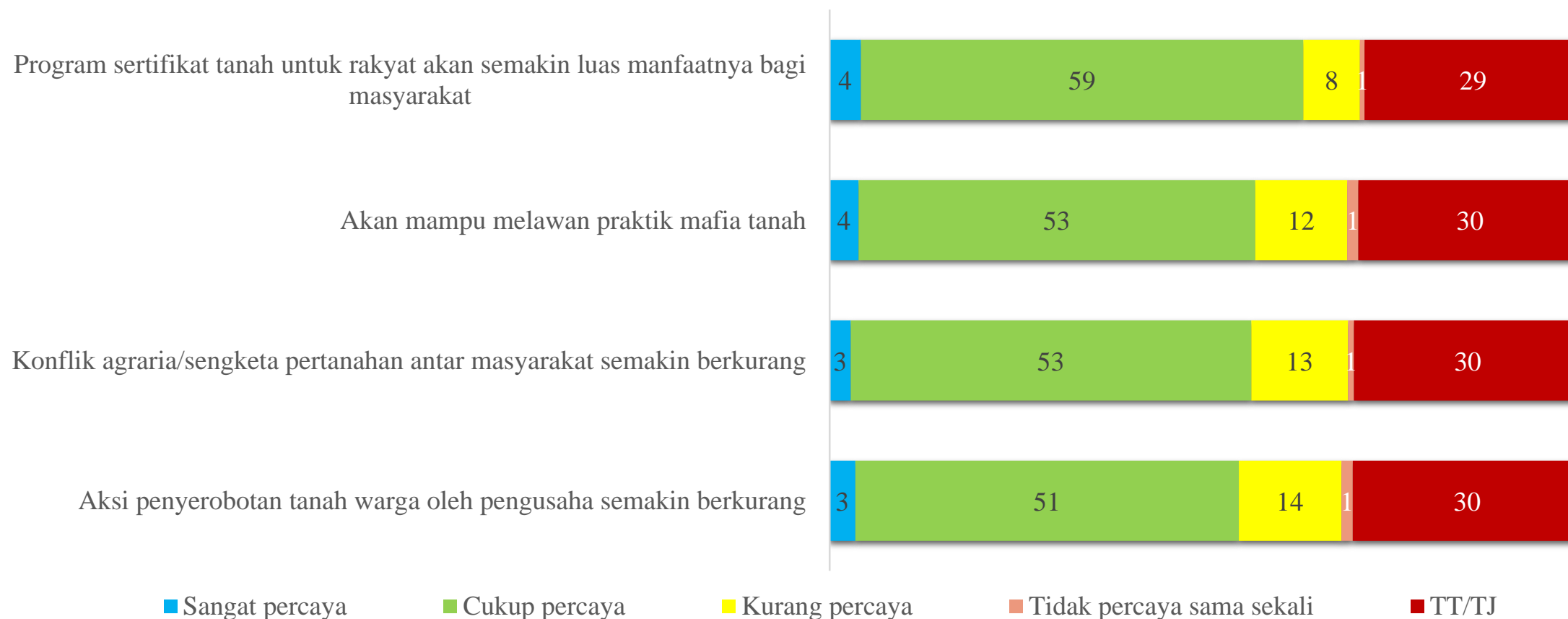
Hanya 6% yang tahu program Hotline Pengaduan, mayoritas menilai bermanfaat.

Menurut Ibu/Bapak seberapa bermanfaat program Hotline Pengaduan tersebut bagi masyarakat dalam urusan pertanahan dan tata ruang? (%)



SEBERAPA PERCAYA BAHWA BAHWA DI BAWAH MENTERI ATR ...

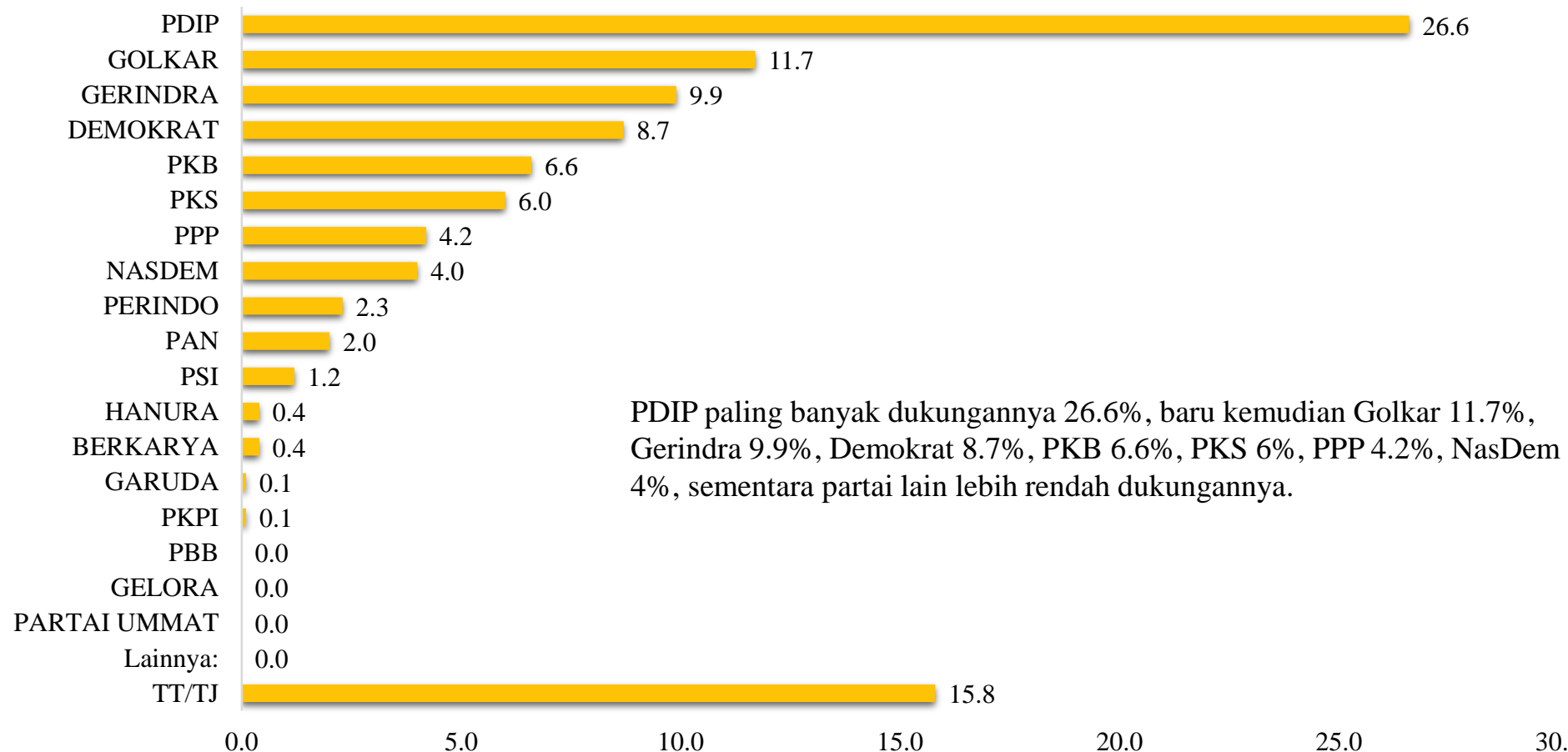
Seberapa percaya Ibu/Bapak **di bawah Menteri ATR/BPN yang baru, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto...** (%)



PILIHAN PARTAI DPR RI

PILIHAN PARTAI DPR RI (SIMULASI SEMI TERBUKA 18 DAFTAR NAMA DAN LAMBANG PARTAI)

Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih di antara partai berikut ini? (%)

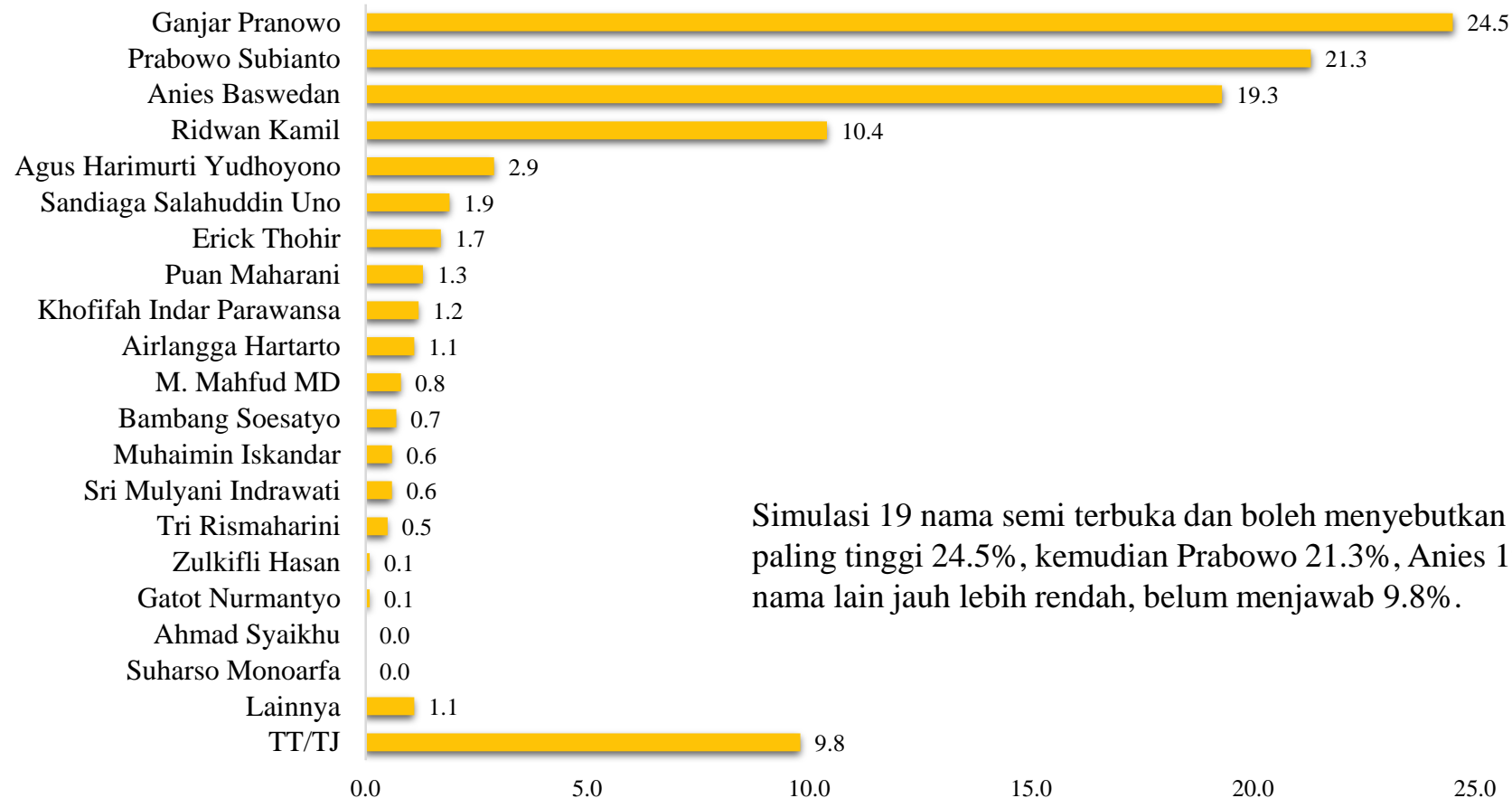


PDIP paling banyak dukungannya 26.6%, baru kemudian Golkar 11.7%, Gerindra 9.9%, Demokrat 8.7%, PKB 6.6%, PKS 6%, PPP 4.2%, NasDem 4%, sementara partai lain lebih rendah dukungannya.

PILIHAN PRESIDEN

SIMULASI 19 NAMA SEMI TERBUKA

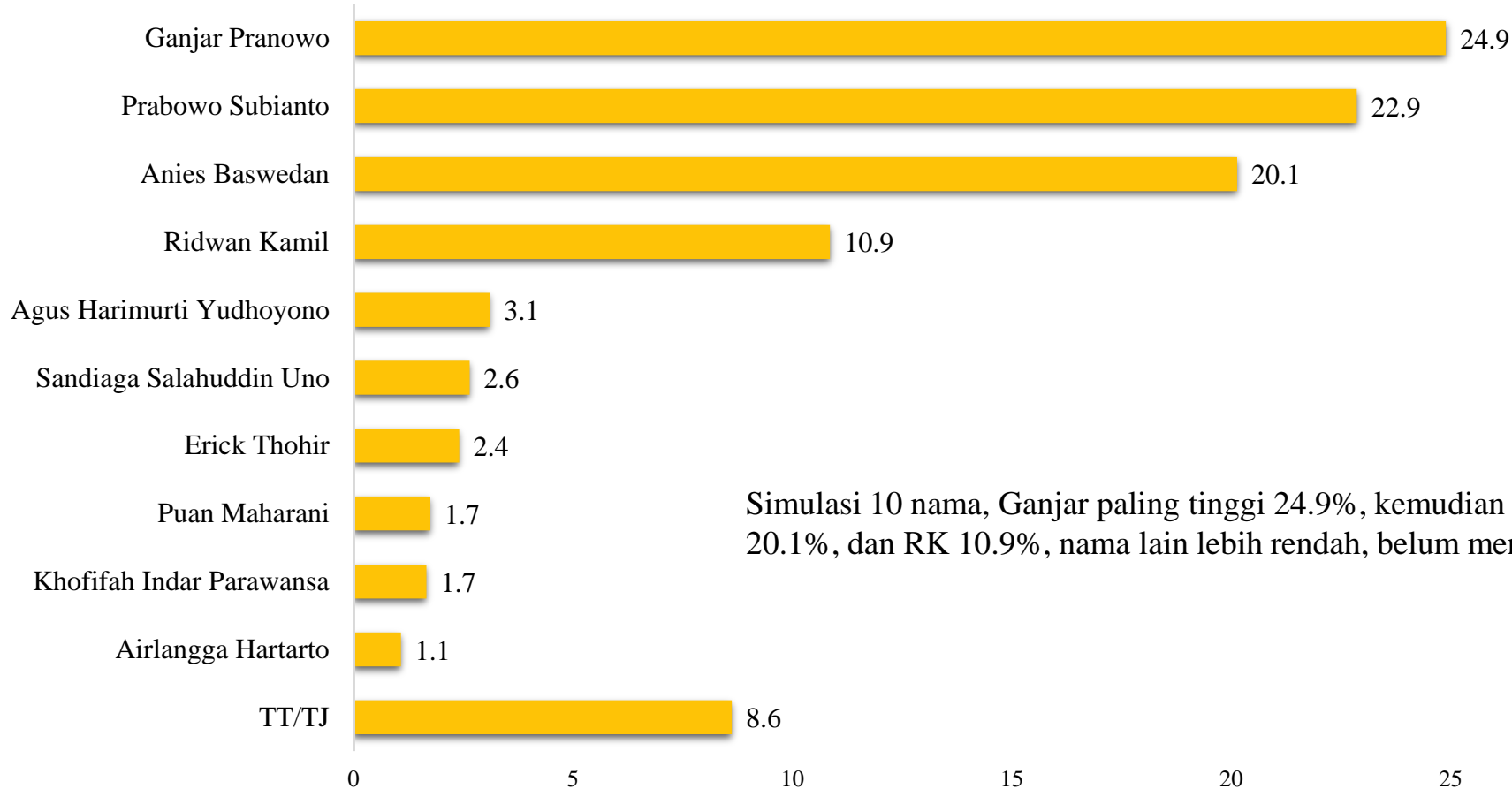
Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? (%)



Simulasi 19 nama semi terbuka dan boleh menyebutkan nama lainnya, Ganjar paling tinggi 24.5%, kemudian Prabowo 21.3%, Anies 19.3%, dan RK 10.4%, nama lain jauh lebih rendah, belum menjawab 9.8%.

SIMULASI TERTUTUP 10 NAMA

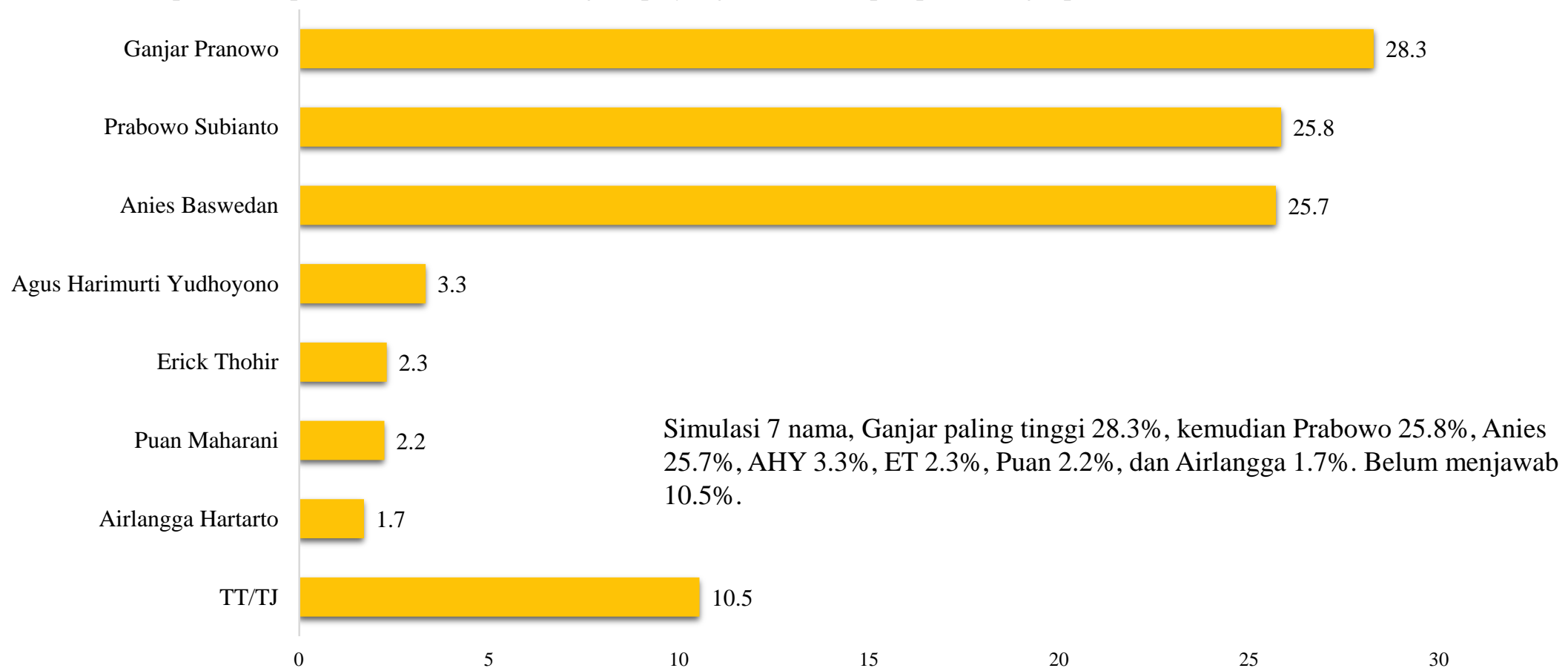
Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? (%)



Simulasi 10 nama, Ganjar paling tinggi 24.9%, kemudian Prabowo 22.9%, Anies 20.1%, dan RK 10.9%, nama lain lebih rendah, belum menjawab 8.6%.

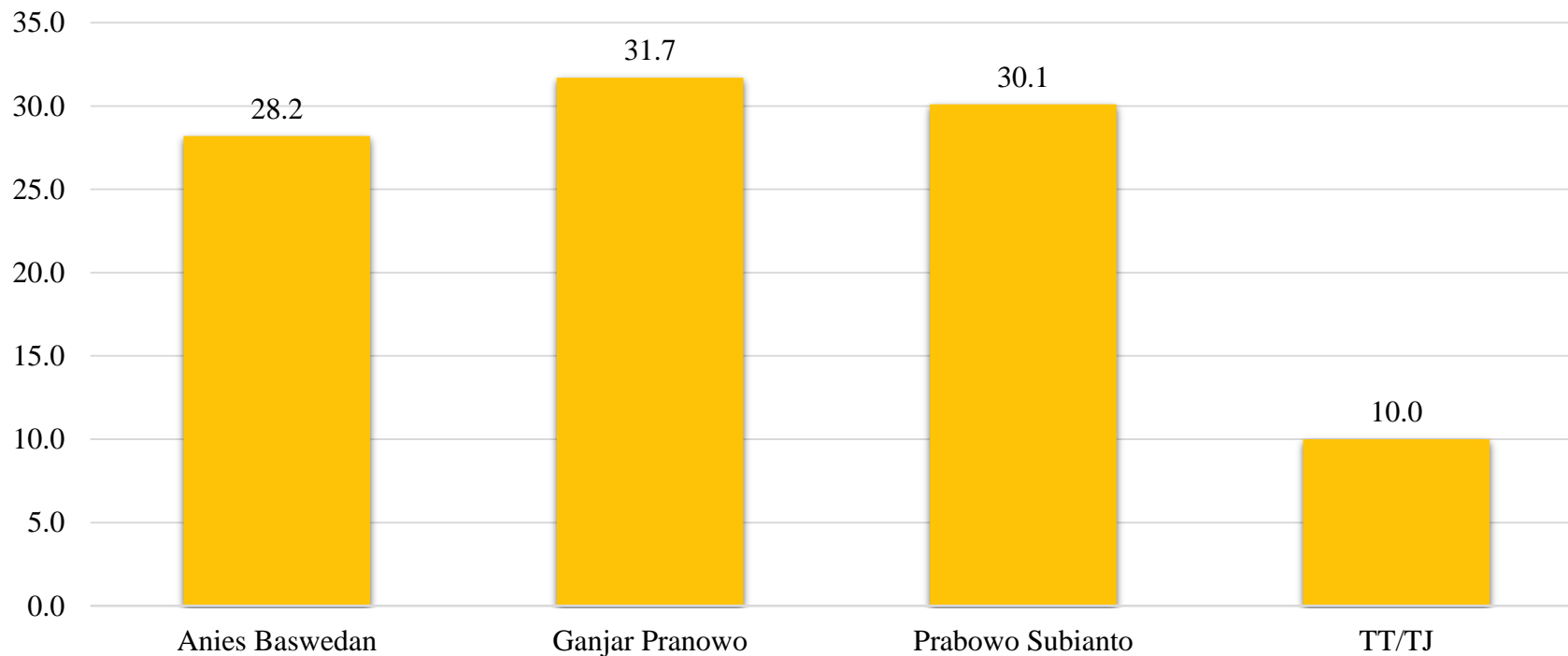
SIMULASI TERTUTUP 7 NAMA

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? (%)



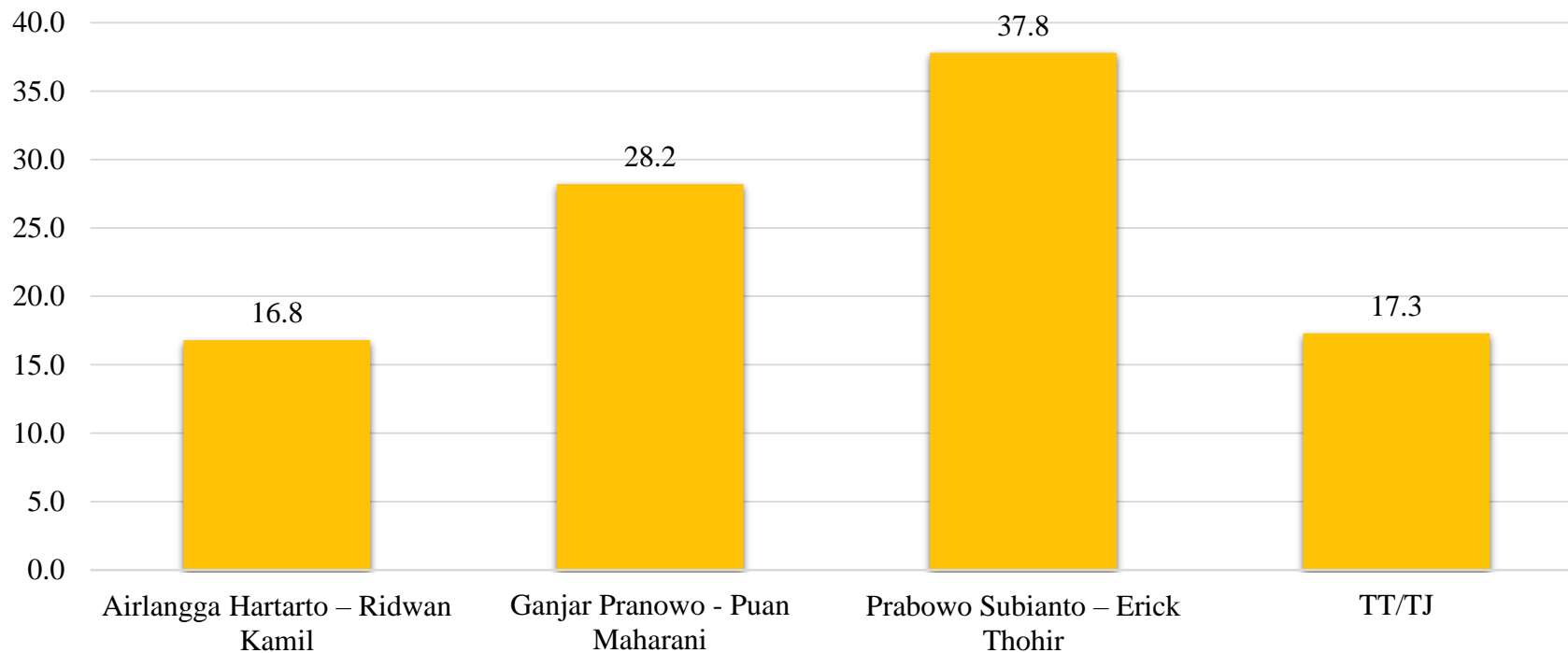
SIMULASI TERTUTUP 3 NAMA

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? (%)



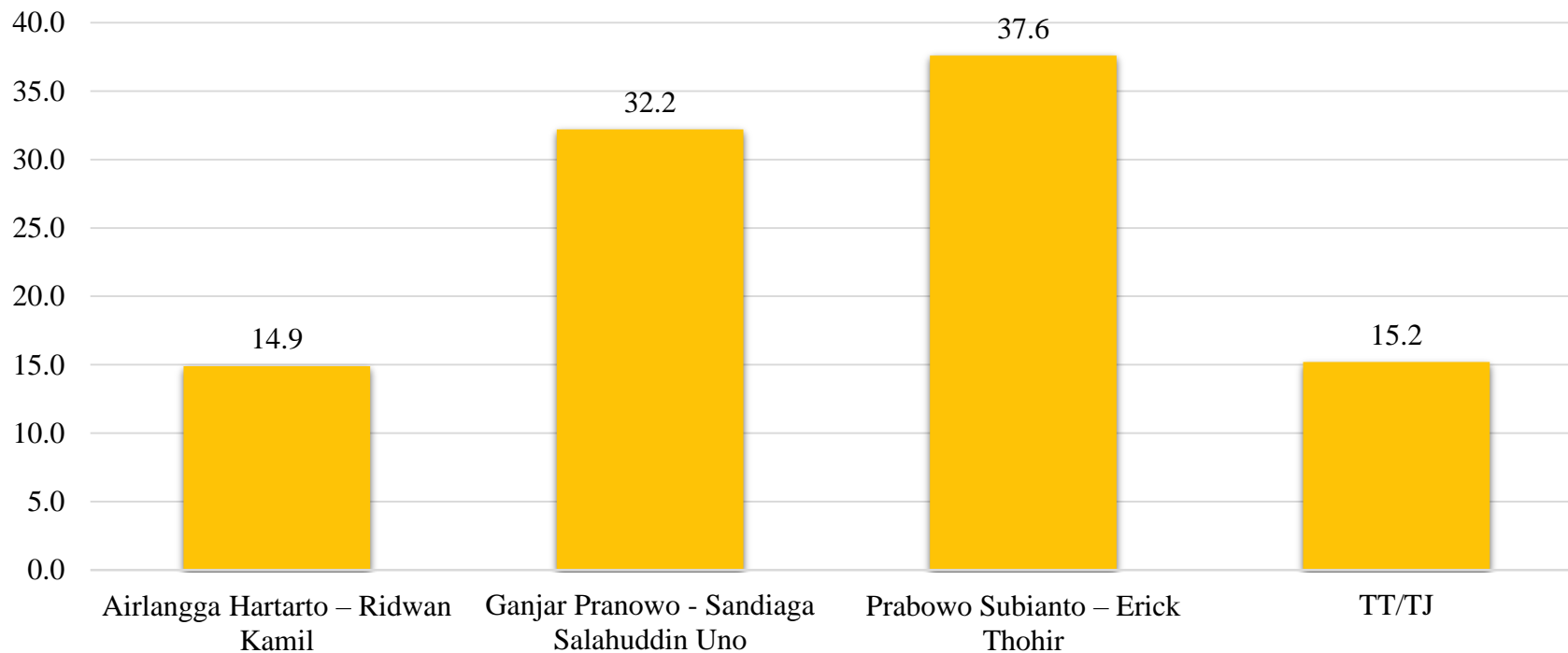
SIMULASI TERTUTUP 3 PASANGAN

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih di antara pasangan nama berikut ini? (%)



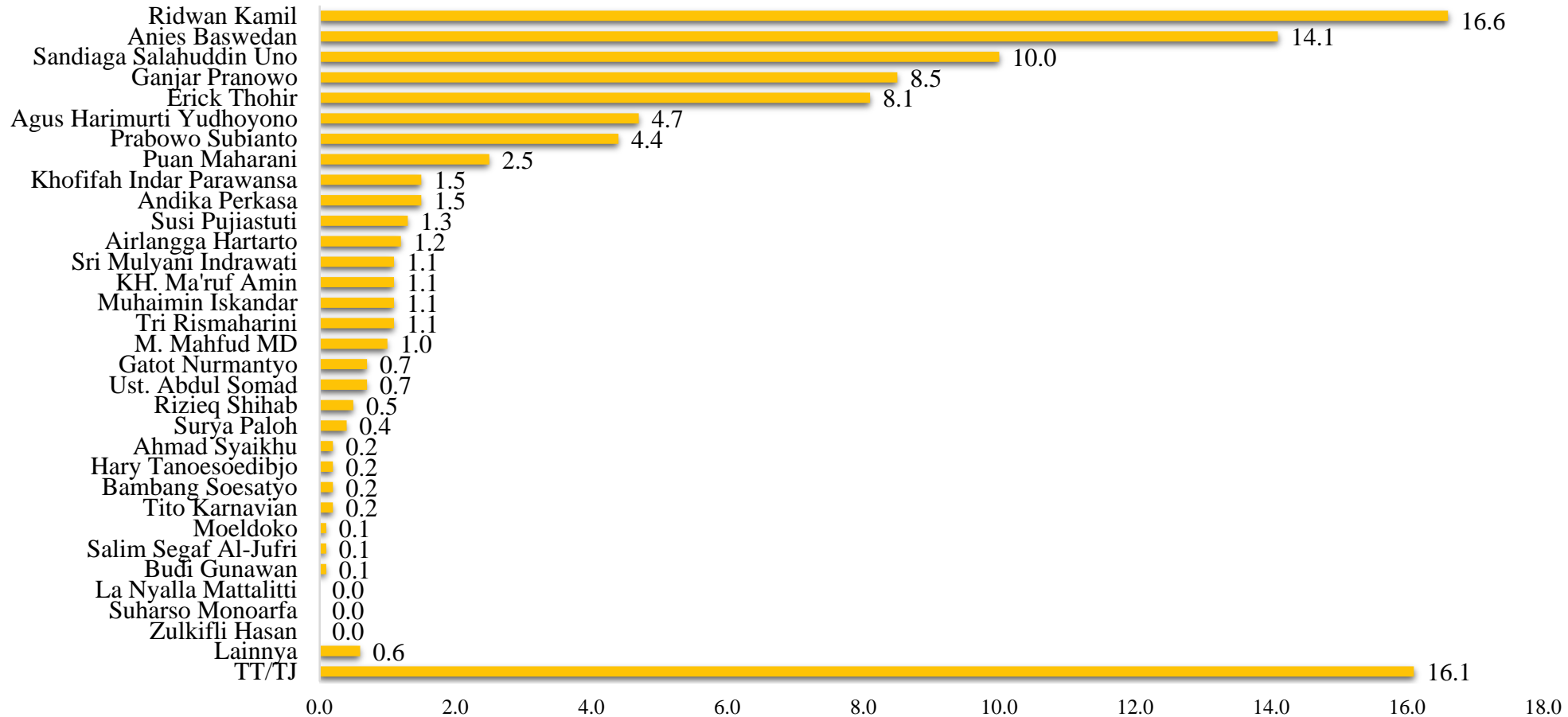
SIMULASI TERTUTUP 3 PASANGAN

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih di antara pasangan nama berikut ini? (%)



SIMULASI TERTUTUP 31 NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang Ibu/Bapak anggap paling pantas sebagai calon Wakil Presiden di antara nama-nama berikut? (%)



KESIMPULAN

KESIMPULAN

KONDISI UMUM DAN KINERJA PRESIDEN

- Kondisi ekonomi saat ini lebih banyak dinilai sedang, 46%. Sementara yang menilai baik/sangat baik (26.2%) sama banyak dengan yang menilai buruk/sangat buruk (26.9%).
- Begitu juga dengan kondisi politik, lebih banyak yang menilai sedang, 41.9%. Sementara yang menilai baik/sangat baik (32.1%) lebih tinggi dibanding dengan yang menilai buruk/sangat buruk (17.7%).
- Mayoritas warga merasa puas dengan kinerja demokrasi saat ini, 77.7%.
- Kepuasan presiden cenderung meningkat dibanding temuan di Mei 2022, saat ini 72.3% merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
- Penilaian warga terhadap kondisi ekonomi nasional dan kondisi politik memiliki korelasi positif dan signifikan dengan kepuasan warga terhadap kinerja presiden.

KESIMPULAN

ISU EKONOMI

- Mengenai subsidi, mayoritas lebih setuju jika subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
- Mayoritas juga kurang/tidak setuju kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan pembelian Peralite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina dan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- Lebih banyak yang berpendapat bahwa harga bahan bakar tidak dinaikkan meski harus menambah hutang.

KESIMPULAN

PERPAJAKAN

- Sekitar 19% mengaku punya NPWP, dari yang punya NPWP mayoritas menyampaikan SPT dan membayar pajak PPh.
- Dari yang memiliki NPWP, sekitar 49% tahu bahwa pemerintah menetapkan orang yang berpenghasilan hingga Rp. 4.5 juta/bulan tidak kena kena pajak.
- Kemudian dari yang memiliki NPWP, mayoritas, 65.5%, tidak tahu bahwa pemerintah mengurangi beban pajak dengan hanya menerapkan tarif pajak sebesar 5% kepada Orang Pribadi yang berpenghasilan hingga Rp. 60 juta/tahun (>4.5 juta s/d 5 juta/bulan).
- Dari yang wiraswasta/usaha sendiri, sekitar 26% sudah mengetahui atau pernah dengar bahwa tarif PPh final atas kegiatan usaha UMKM dengan omset hingga 4.8 miliar telah diturunkan dari 1% menjadi 0.5%. Dari yang tahu mayoritas merasa mendapat manfaat.
- Selain itu, dari yang wiraswasta/usaha sendiri, mayoritas tidak tahu, sementara hanya 25.6% yang tahu dan setuju bahwa mulai tahun 2022 ini omset usaha Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 500 juta tidak dikenakan tarif PPh final.

KESIMPULAN

PERPAJAKAN

- Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak.
- Hanya 15% yang tahu bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Publik yang merasa paham/cukup paham dengan pajak lebih banyak dibanding yang kurang/tidak paham, sementara yang kurang paham/tidak paham dengan manfaat uang pajak relative sama dengan yang paham/cukup paham.
- Mayoritas merasa mudah/cukup mudah dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
- Sekitar 48% tahu adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan. Kendala utama dalam menunaikan kewajiban perpajakan adalah kondisi keuangan yang kurang baik.
- Mayoritas cukup percaya/percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong.
- Sekitar 12% tahu PPS, dari yang tahu sekitar 16.6% mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut.

KESIMPULAN

PERPAJAKAN

- Kebanyakan percaya/ cukup percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- Kebanyakan menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan berlaku.

KESIMPULAN

PERTANAHAN

- Pengetahuan warga terhadap program sertifikat tanah dan program lainnya masih rendah.
- Sekitar 29.7% pernah dengar program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Sekitar 14% mengajukan pembuatan sertifikat tanah atau menjadi peserta program PTSL tersebut, dari yang tahu mayoritas puas dengan program PTSL tersebut.
- Hanya 5% yang tahu, mayoritas menilai PELATARAN bermanfaat.
- Hanya 6% yang tahu program Hotline Pengaduan, mayoritas menilai bermanfaat.

KESIMPULAN

PILIHAN PARTAI DPR RI

- Saat ini dengan menggunakan simulasi semi terbuka 18 daftar nama dan lambang partai, PDIP paling banyak dukungannya 26.6%, baru kemudian Golkar 11.7%, Gerindra 9.9%, Demokrat 8.7%, PKB 6.6%, PKS 6%, PPP 4.2%, NasDem 4%, sementara partai lain lebih rendah dukungannya.

PILIHAN PRESIDEN

- Simulasi 19 nama semi terbuka dan boleh menyebutkan nama lainnya, Ganjar paling tinggi 24.5%, kemudian Prabowo 21.3%, Anies 19.3%, dan RK 10.4%, nama lain jauh lebih rendah, belum menjawab 9.8%.
- Simulasi 10 nama, Ganjar paling tinggi 24.9%, kemudian Prabowo 22.9%, Anies 20.1%, dan RK 10.9%, nama lain lebih rendah, belum menjawab 8.6%.
- Simulasi 7 nama, Ganjar paling tinggi 28.3%, kemudian Prabowo 25.8%, Anies 25.7%, AHY 3.3%, ET 2.3%, Puan 2.2%, dan Airlangga 1.7%. Belum menjawab 10.5%.
- Pada simulasi 3 nama, Ganjar (31.7%) lebih tinggi dukungannya dari Prabowo (30.1%) dan Anies (28.2%), namun selisihnya tidak jauh berbeda.

TERIMA KASIH

